



**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA  
PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA PEGAWAI  
PADA KOTA BOGOR TAHUN 2016-2020**

Skripsi

Dibuat Oleh :  
Syifa Amalina  
022118039

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS PAKUAN  
BOGOR**

**Juni 2022**



**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA  
PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA PEGAWAI  
PADA KOTA BOGOR TAHUN 2016-2020**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi  
Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan  
Bogor

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
(Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM., CA)



Ketua Program Studi Akuntansi  
(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA, CMA,  
CCSA, CA, CSEP, QIA)

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA  
PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA PEGAWAI  
PADA KOTA BOGOR TAHUN 2016-2020**

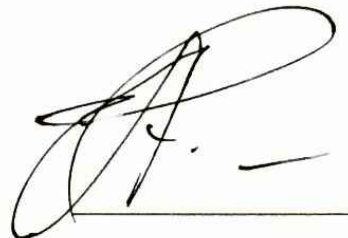
Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus  
Pada hari Rabu, tanggal 06 Juli 2022

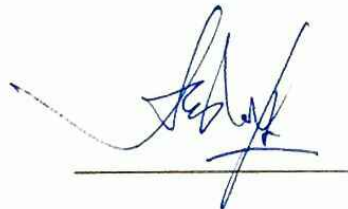
Syifa Amalina  
022118039

Disetujui

Ketua Penguji Sidang  
(Drs. Monang Situmorang, MM., Akt)



Ketua Komisi Pembimbing  
(Ahmad Burhanudin Taufik, Ak., ME., CA)



Anggota Komisi Pembimbing  
(Dessy Herlinawati, SE., Msi., CAP)



---

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Syifa Amalina

NPM : 022118039

Judul Skripsi : PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA  
PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA PEGAWAI PADA KOTA BOGOR  
TAHUN 2016-2020

Dengan ini saya menyatakan bahwa Paten dan Hak Cipta dari produk skripsi di atas adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun.

Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan Paten, Hak Cipta dari karya tulis saya kepada Universitas Pakuan.

Bogor, 2022



Syifa Amalina  
022118039

**© Hak Cipta milik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, tahun 2022)**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-undang**

*Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.*

*Dilarang mengumumkan dan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.*

## ABSTRAK

SYIFA AMALINA. 022118039. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Pegawai Pada Kota Bogor Tahun 2016-2020. Dibawah bimbingan : AHMAD BURHANUDIN TAUFIK dan DESSY HERLINAWATI. 2022

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan terhadap belanja pegawai baik secara simultan maupun parsial pada kota Bogor Tahun 2016 - 2020.

Metode penelitian dalam skripsi ini adalah menggunakan penelitian kuantitatif, dengan Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Laporan Realisasi Anggaran Kota Bogor. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan purposive sampling yang terdiri dari tahun 2016-2020. Data yang digunakan berupa data sekunder laporan realisasi anggaran kota Bogor yang diperoleh melalui situs Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan ([www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)). Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda dengan uji f dan uji t.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dan dana perimbangan secara simultan tidak berpengaruh terhadap belanja pegawai. Secara parsial Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Pegawai pada Kota Bogor tahun 2016-2020 dan Dana Perimbangan tidak berpengaruh terhadap Belanja Pegawai pada kota Bogor 2016-2020. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa Belanja Pegawai mampu dijelaskan oleh variabel independen yaitu pendapatan asli daerah dan dana perimbangan sebesar 3,7%, sisanya yakni 96,3% dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian ini.

**Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Pegawai**

## PRAKATA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Pean Terhap Belanja Pegawai Pada Kota Bogor Tahun 2016-2020" sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi S1 Akuntansi Universitas Pakuan.

Dalam penyusunan Skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan, saran, motivasi serta doa dari berbagai pihak selama penulisan skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa yaitu Allah SWT yang telah memberikan saya Kesehatan dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. rer. pol. Ir. H. Didik Notosudjono, M.Sc. Selaku Rektor Universitas Pakuan
3. Bapak Dr. Hendro Sasongko, Ak., M.M., CA. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.
4. Bapak Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA. Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.
5. Bapak Ahmad Burhanudin Taufiq, Ak., MM., CA. Selaku Ketua Komisi Pembimbing yang senantiasa memberikan bimbingan, masukan-masukan serta motivasi kepada penulis dalam penyusunan Skripsi ini.
6. Ibu Dessy Herlinawati, SE., Msi., CAP. Selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah membimbing, memberikan masukan-masukan dan motivasi kepada penulis dalam penyusunan Skripsi ini.
7. Seluruh Dosen, Staff Tata Usaha, dan Karyawan Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan yang telah banyak memberikan ilmu serta pengalaman yang sangat bermanfaat bagi kehidupan penulis.
8. Orang Tua tercinta Bapak Marsidi dan Ibu Linda Erliana yang telah memberikan semangat, doa, dan dorongan motivasi dan semangat.
9. Tante termuda Rahma Fitria
10. Seluruh rekan mahasiswa Akuntansi Khususnya Akuntansi Sektor Publik dan kelas D Angkatan 2018 serta sahabat-sahabat terbaik saya Mega Putri, Rizkiadinda CCP, Felicia Rascha, Della Maulina, Nurul Rizqia, dan Arini Utami yang ikut serta memberikan dukungan dan semangat kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam Menyusun skripsi ini masih banyak kekurangan serta jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Bogor, Juni 2022

Syifa Amalina



## DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SIDANG SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN PELIMPAHAN HAK CIPTA.....	iv
LEMBAR HAK CIPTA .....	v
ABSTRAK.....	vi
PRAKATA .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah.....	6
1.2.1 Identifikasi Masalah .....	6
1.2.2 Perumusan Masalah.....	6
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian .....	7
1.3.1 Maksud Penelitian .....	7
1.3.2 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Kegunaan Penelitian.....	7
1.4.1 Kegunaan Praktis.....	7
1.4.2 Kegunaan Akademis .....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	9
2.1. Pendapatan Asli Daerah .....	9
2.1.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah .....	9
2.1.2. Sumber Pendapatan Pendapatan Asli Daerah .....	10
2.2 Dana Perimbangan .....	14
2.2.1. Pengertian Dana Perimbangan .....	14
2.2.2. Komponen Dana Perimbangan.....	15
2.3 Belanja Pegawai .....	19

2.3.1 Pengertian Belanja Pegawai .....	19
2.3.2 Klasifikasi Belanja Pegawai.....	20
2.4 Penelitian Terdahulu.....	21
2.5 Kerangka Pemikiran .....	31
2.6 Hipotesis Penelitian .....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	35
3.2 Objek, Unit analisis, dan Lokasi Penelitian .....	35
3.2.1 Objek .....	35
3.2.2 Unit Analisis.....	35
3.2.3 Lokasi Penelitian .....	35
3.3. Jenis dan Sumber data Penelitian .....	35
3.4 Operasionalisasi Variabel.....	35
3.5 Metode Penarikan Populasi dan Sampel .....	36
3.6 Metode Pengumpulan Data .....	36
3.7 Metode Pengolahan / Analisis Data .....	36
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>41</b>
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	41
4.1.1 Sejarah Singkat Kota Bogor .....	41
4.1.2 Struktur Organisasi, Tugas dan Wewenang Pemerintahan Kota Bogor .	43
4.2 Hasil Pengumpulan Data .....	43
4.2.1 Pendapatan Asli Daerah pada Kota Bogor .....	44
4.2.2 Dana Perimbangan pada Kota Bogor .....	45
4.2.3 Belanja Pegawai Pada Kota Bogor.....	47
4.3 Analisis Data .....	48
4.3.1 Analisis Deskriptif Statistik .....	48
4.3.2 Uji Asumsi Klasik .....	49
4.3.3 Analisis Regresi Linear Berganda .....	54
4.3.4 Analisis Uji Hipotesis.....	56
4.4 Pembahasan & Interpretasi Hasil Penelitian .....	58
4.4.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Pegawai.....	59
4.4.2 Dana Perimbangan terhadap Belanja Pegawai.....	60
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>62</b>
5.1 Kesimpulan.....	62

5.2 Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	65
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	67
LAMPIRAN .....	68

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Presentase Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja Daerah pada Kota Bogor tahun 2016-2020 .....	2
Tabel 1. 2 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan pada Kota Bogor Tahun 2016-2020 .....	4
Tabel 2. 1 Review Peneliti Terdahulu .....	22
Tabel 3. 1 Oprasionalisasi Variabel.....	35
Tabel 3. 2 Tabel Durbin - Watson .....	38
Tabel 4. 1 Rasio Efektivitas pada Kota Bogor tahun 2016-2020 .....	44
Tabel 4. 2 Kriteria Penilaian Efektivitas.....	45
Tabel 4. 3 Rasio Ketergantungan pada Kota Bogor tahun 2016-2020 .....	46
Tabel 4. 4 Kriteria Penilaian Ketergantungan .....	47
Tabel 4. 5 Rasio Aktivitas Belanja Pegawai pada Kota Bogor tahun 2016-2020 .....	47
Tabel 4. 6 Kriteria Penilaian Aktivitas .....	48
Tabel 4. 7 Statistik Deskriptif.....	49
Tabel 4. 8 Uji Normalitas .....	50
Tabel 4. 9 Uji Multikolinearitas.....	52
Tabel 4. 10 Uji Autokolerasi.....	54
Tabel 4. 11 Uji Analisis Regresi Linear Berganda .....	55
Tabel 4. 12 Uji Koefisien Determinasi (R <sup>2</sup> ).....	56
Tabel 4. 13 Uji t (Parsial).....	57
Tabel 4. 14 Uji f (Simultan).....	58
Tabel 4. 15 Kesimpulan Hasil Uji Hipotesis .....	59

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Grafik PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2016-2020.	5
Gambar 1. 2 Grafik Dana Perimbangan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2016-2020 .....	5
Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran.....	32
Gambar 4. 1 Grafik Rasio Efektivitas pada Kota Bogor Tahun 2016-2020.....	45
Gambar 4. 2Grafik Rasio Ketergantungan pada Kota Bogor tahun 2016-2020 .....	46
Gambar 4. 3 Grafik Rasio Aktivitas pada Kota Bogor tahun 2016-2020.....	48
Gambar 4. 4 Grafik Histogram Uji Normalitas .....	51
Gambar 4. 5 Grafik Normal P-Plot Uji Normalitas .....	51
Gambar 4. 6 Grafik Uji Heteroskedastisitas .....	53

## DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 Realisasi PAD, Dana Perimbangan dan Belanja Pegawai pada Kota Bogor Tahun 2016-2020.....	68
LAMPIRAN 2 Data Perhitungan Rasio Efektivitas, Ketergantungan dan Aktivitas	69
LAMPIRAN 3 Hasil Olah SPSS .....	71

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pada tahun 2001, Indonesia melakukan otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan otonomi daerah adalah mencapai efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyerahan ini adalah antara lain menumbuhkembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah, meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan. Dampak pemberian otonomi ini tidak hanya terjadi pada organisasi/administratif pemerintah daerah saja, akan tetapi berlaku pula pada masyarakat (publik) dan badan atau lembaga swasta dalam berbagai bidang. Dengan demikian, otonomi ini membuka kesempatan bagi pemerintah daerah secara langsung membangun kemitraan dengan publik dan pihak swasta daerah yang bersangkutan dalam berbagai bidang.

Dengan adanya otonomi daerah, maka pemerintah pusat melakukan perubahan sistem ekonomi dengan mempercayakan pemerintah daerah untuk mengelola keuangannya sendiri. Pengelolaan Keuangan Daerah mencakup keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Keuangan Daerah sebagai bagian dari Pengelolaan Keuangan Negara memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kewajiban Pemerintah Daerah mengelola potensi Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, dan Sumber Daya Keuangan secara optimal harus di terapkan. Jika sumber dana dikelola dengan baik, maka pertumbuhan ekonomi daerah akan terus meningkat dan juga lebih cepat untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat. Sumber dana yang dimiliki daerah pada hakikatnya akan di gunakan untuk pembiayaan program pemerintahan daerah.

Permendagri No. 77 Tahun 2020 menyatakan bahwa Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Dalam hal ini, pemerintah daerah dituntut untuk mandiri dalam mengelola keuangannya termasuk juga didalamnya untuk pembiayaan penyelenggaraan program pemerintahan, pembiayaan penyelenggaraan program pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi dilakukan atas beban APBD. Dalam rangka penyelenggaraan program pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat maka setiap daerah diberi kewenangan untuk memungut pajak/retribusi daerah dan mengelola Sumber Daya Alam yang dimiliki daerah.

Sumber dana yang didapatkan daerah terdiri dari 3 sumber pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan bagian daerah dari Dana Bagi Hasil (DBH) pajak dan bukan pajak, serta pendapatan lain-lain daerah yang sah. Sedangkan belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung, belanja tidak langsung berupa: belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada prov/kab/kota dan pemdes, belanja bantuan keuangan kepada prov/kab/kota dan pemdes, dan belanja tidak terduga, sedangkan belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah langsung dikelola oleh Pemerintah Daerah melalui APBD, sedangkan yang lainnya dikelola oleh Pemerintah Pusat melalui kerja sama dengan Pemerintah Daerah.

Tabel 1. 1  
Persentase Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja Daerah Pada Kota Bogor Tahun 2016-2020

Tahun	Belanja Pegawai	Total Belanja Daerah	Persentase
2016	1.044.030.978.405	2.155.296.888.270	48,44%
2017	1.030.115.640.840	2.245.590.002.914	45,87%
2018	1.108.690.038.689	2.406.586.936.843	46,07%
2019	1.181.889.361.829	2.528.443.956.613	46,74%
2020	1.010.111.841.189	2.354.870.702.982	42,89%

Sumber : Hasil Olah Data ([djpk.kemenkeu.go.id](http://djpk.kemenkeu.go.id))

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa presentase belanja pegawai di Kota Bogor dari tahun 2016 sampai 2020 naik turun. Pada tahun 2016 persentasenya hampir mendekati setengah dari total belanja daerah yaitu 48,44% dengan nilai belanja pegawainya sebesar Rp. 1.044.030.978.405 lalu tahun 2017 persentasenya dan nilai belanja daerahnya menurun menjadi 45,87% dan Rp. 1.030.115.640.840 selanjutnya di tahun 2018 dan 2019 kembali naik persentasenya yaitu menjadi 46,07% dan 46,74% yang dimana diikuti juga kenaikan nilai belanja pegawainya yaitu menjadi Rp. 1.108.690.038.689 dan Rp. 1.181.889.361.829 kemudian terjadi penurunan yang cukup drastis di tahun 2020 yaitu menjadi 42,89% persentasenya dan Rp. 1.010.111.841.189 nilai belanja pegawainya.

Dilihat dari data diatas rata rata persentase belanja pegawai hampir menginjak angka 50% yang artinya belanja pegawai mendominasi terhadap total belanja daerah. Pada tabel diatas juga terlihat bahwa perbandingan antara belanja pegawai dengan total belanja daerah banyak mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dari data tersebut peneliti ingin melakukan penelitian ini untuk mengetahui apakah belanja pegawai Kota Bogor yang cukup mendominasi terhadap total belanja daerah di pengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Perimbangan.

Dari data di atas juga kita mengetahui bahwa sebagian besar APBD banyak digunakan untuk belanja pegawai, hal ini juga menarik perhatian publik yang ingin mengetahui kemana saja aliran dana APBD, karena sebagian dana APBD yang



diterima pemerintah daerah merupakan uang publik yang termasuk dalam pajak daerah dan retribusi daerah, pajak daerah dan retribusi daerah merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Menurut (Isdijoso dalam Yoyo Sudaryo, 2017) PAD merupakan akumulasi dari pos penerimaan pajak yang berisi pajak daerah dan pos retribusi daerah, pos penerimaan nonpajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, pos penerimaan investasi serta pengelolaan sumber daya alam. Sementara itu, menurut Mardiasmo dalam Yoyo Sudaryo PAD adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. UU No.33 Tahun 2004, PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumber-sumber penerimaan PAD harus dicari terus untuk dapat digunakan sebagai pembiayaan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan daerah dalam era otonomi daerah. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap daerah berbeda-beda, daerah yang memiliki kemajuan dibidang industri dan memiliki kekayaan alam yang melimpah cenderung memiliki PAD yang jauh lebih besar dibanding dengan lainnya. Hal ini yang menyebabkan ketimpangan PAD, untuk mengurangi kesenjangan daerah, maka pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang menjelaskan tentang Perimbangan Keuangan antara pusat dan daerah memberikan dampak yang luas bagi pelaksanaan otonomi daerah. Dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan mentransfer dana. Bentuk transfer ke daerah tersebut dalam bentuk dana perimbangan. Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dan perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) , Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Dana Perimbangan sangat berperan terhadap belanja pegawai, karena jika jumlah dana perimbangan dari pemerintah pusat dikurangi maka menyebabkan belanja pegawai menurun sehingga ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana perimbangan dari pemerintah pusat menjadi semakin tinggi.

Dalam penelitian ini Kota Bogor masih belum bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah disetiap tahunnya, ketergantungan terhadap dana perimbangan masih terus berlanjut dari tahun ke tahunnya. Berikut adalah ikhtisar dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan pada Kota Bogor tahun 2016-2020.

Tabel 1. 2

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Kota Bogor Tahun 2016-2020

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Dana Perimbangan (Rp)
2016	783.873.587.219	1.097.614.311.436
2017	978.197.741.947	1.072.486.473.770
2018	912.197.971.288	1.066.762.734.201
2019	1.015.884.216.919	1.106.494.405.814
2020	872.017.242.152	1.083.171.964.899

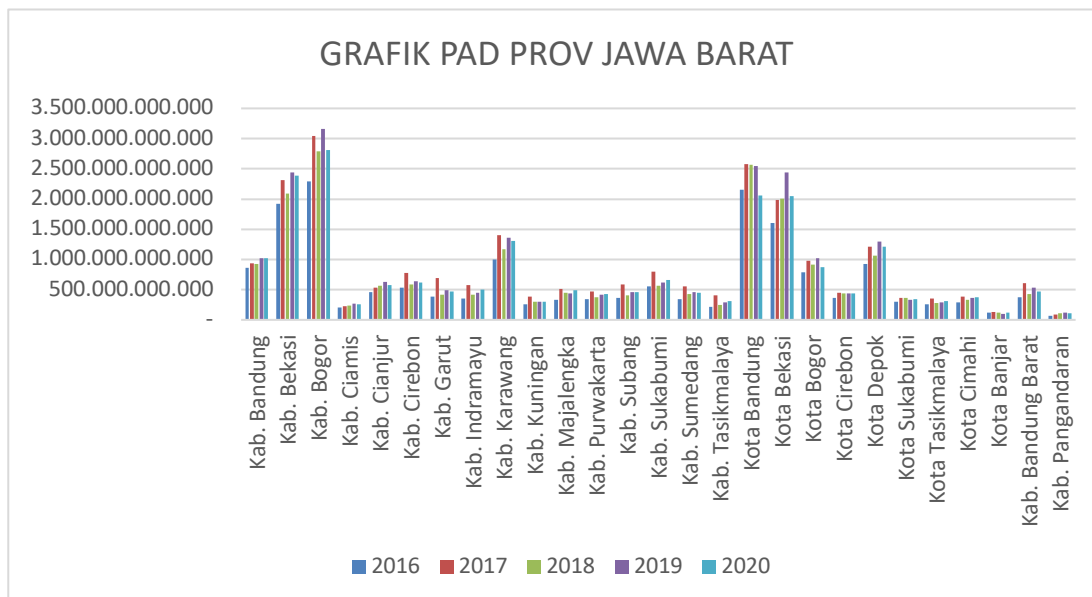
Sumber : [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)

Berdasarkan tabel 1.1 pendapatan asli daerah Kota Bogor dalam jangka tahun 2016 sampai 2018 memiliki perubahan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 sebesar Rp. 783.873.587.219 kemudian mengalami kenaikan yang sangat tinggi di tahun 2017 yaitu menjadi sebesar Rp. 978.197.741.947 selanjutnya mengalami penurunan kembali di tahun 2018 menjadi Rp. 912.197.971.288 dan kemudian di tahun 2019 kembali mengalami kenaikan menjadi Rp. 1.015.884.216.919 namun di tahun 2020 mengalami penurunan lagi menjadi sebesar Rp. 872.017.242.152.

Sedangkan, laporan realisasi anggaran dana perimbangan Kota Bogor tahun 2016 menunjukkan sebesar Rp. 1.097.614.311.436 kemudian di tahun 2017 dan 2018 mengalami penurunan yaitu menjadi sebesar Rp. 1.072.486.473.770 dan Rp. 1.066.762.734.201 selanjutnya di tahun 2019 mengalami kenaikan kembali menjadi sebesar Rp. 1.106.494.405.814 namun di tahun 2020 mengalami penurunan kembali sebesar Rp. 1.083.171.964.899.

Dari tabel diatas diketahui pendapatan asli daerah dan dana perimbangan di Kota Bogor tahun 2016-2020 mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun. Dapat dilihat pula bahwa dana perimbangan masih mendominasi untuk mendanai Kota Bogor, nilainya selalu melebihi nilai Pendapatan Asli Daerah. Maka perlu adanya peningkatan dana pendapatan asli daerah. Karena dengan meningkatnya pendapatan asli daerah dapat meningkatkan anggaran belanja daerah.

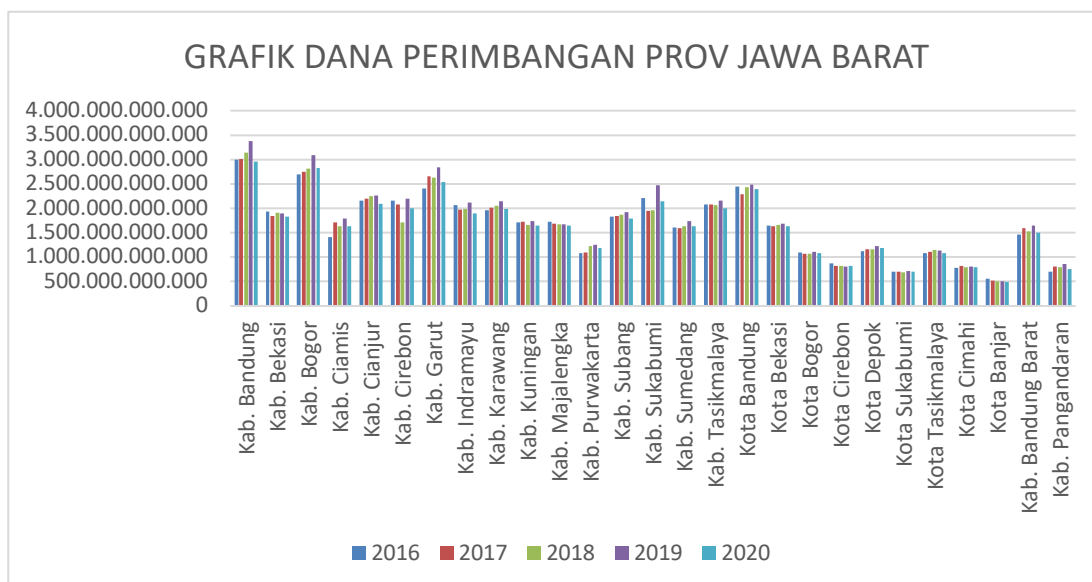
Pada tabel 1.1 dan tabel 1.2 bisa terlihat bahwa rata-rata hampir 100% Pendapatan Asli Daerah hanya bisa untuk mendanai Belanja Pegawai saja, sedangkan Belanja-belanja lainnya masih harus ditangani oleh dana dari pemerintah pusat sehingga masih banyak target atau program pemerintah yang masih belum terlaksana. Hal ini membuktikan bahwa Kota Bogor belum mencapai efektif dan efisien dalam pelayanan kepada masyarakat. Namun pendapatan daerah Kota Bogor bukanlah yang sangat buruk di Provinsi Jawa Barat, dapat dibuktikan pada grafik-grafik berikut:



Sumber: data diolah penulis, 2022

Gambar 1. 1

Grafik PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat 2016-2020



Sumber; data diolah penulis,2022

Gambar 1. 2

Grafik Dana Perimbangan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat 2016-2020

Dari gambar 1.1 dan 1.2 bisa terlihat bahwa PAD dan Dana Perimbangan di Kota Bogor bisa dikatakan seimbang, Dana yang didapatkan dari pemerintah pusat jumlahnya tidak sampai dua kali lipat Pendapatan Asli Daerahnya. Yang artinya Pendapatan Daerah Kota Bogor bisa dibilang baik, Hanya saja pemerintah daerah Kota Bogor belum bisa mengolahnya lebih bijak untuk anggaran belanja daerahnya terutama pada pengalokasian belanja pegawai yang cukup tinggi.

Fenomena belanja pegawai juga terdapat pada kasus pemekaran daerah yang dilakukan pemerintah yang seharusnya itu menjadi fokus terhadap kesejahteraan masyarakat dan tidak menambah inefisiensi biaya birokrasi lokal. Tetapi pada kenyataannya pemekaran daerah hanya menambah pengeluaran pada daerah otonom terutama pada belanja pegawai.

Berbagai penelitian juga telah dilakukan di antaranya oleh Ricky (2017) dalam penelitiannya tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Jumlah Pegawai terhadap Alokasi Belanja Pegawai pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara tahun . Research gap penelitian ini terdapat pada variable independent yaitu terhadap variable lain yang dapat diteliti seperti jumlah pegawai yang berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Pegawai.

Peneliti terdahulu yang dilakukan oleh Priambudi (2016) yang meneliti tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada kabupaten dan kota di pulau jawa tahun 2013. Dari penelitian tersebut terlihat bahwa peneliti lebih berfokus pada belanja modal, dimana alokasi anggaran belanja terbesar yang di serap dari APBD adalah belanja pegawai yang mencapai rata-rata lebih dari 50% tiap tahunnya.

Penelitian lain juga yang dilakukan oleh Akbar, Indriyani, Fransisca (2016) dalam jurnalnya meneliti tentang pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap pengalokasian belanja pegawai. Research gap penelitian ini terdapat pada variabel independen yaitu terdapat variabel lain yang dapat diteliti seperti Jumlah Pegawai yang berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Pegawai.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dengan skripsi yang berjudul **“PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA PEGAWAI PADA KOTA BOGOR TAHUN 2016-2020”**.

## **1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Jumlah Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan di Kota Bogor tahun 2016-2020 mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun. Dapat dilihat pula bahwa dana perimbangan masih mendominasi untuk mendanai Kota Bogor. Maka perlu adanya peningkatan dana pendapatan asli daerah.
2. Jumlah belanja pegawai naik turun setiap tahunnya, dan presentasinya terhadap total belanja pegawai pun hampir menginjak angka 50% yang artinya belanja pegawai mendominasi terhadap total belanja daerah.

### **1.2.2 Perumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Pegawai pada Kota Bogor?
2. Apakah Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Belanja Pegawai pada Kota Bogor?
3. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan berpengaruh secara simultan terhadap Belanja Pegawai pada Kota Bogor?

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Berdasarkan rumusan-rumusan masalah diatas, penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisa sejauh mana pengaruh Dana Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Belanja pegawai pada Kota Bogor.

#### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Dana Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pegawai pada Kota Bogor.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Pegawai pada Kota Bogor.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Dana Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan secara simultan terhadap Belanja Pegawai pada Kota Bogor.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

#### **1.4.1 Kegunaan Praktis**

1. Bagi Kota Bogor

Penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui sejauh mana pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Pegawai di Kota Bogor. Dan juga sebagai masukan untuk pemerintah dalam mengelola keuangannya agar lebih baik lagi, terutama pada pengalokasian Belanja Pegawai.

2. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan dan wawasan penulis berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Pegawai di Kota Bogor.

3. Bagi pembaca

Penelitian ini dapat menambah wawasan bagi pembaca mengenai keuangan daerah khususnya tentang realisasi APBD dalam mengalokasikan belanja pegawai.

#### **1.4.2 Kegunaan Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi atau literatur dalam pembelajaran mengenai keuangan daerah terutama terhadap pengalokasian belanja pegawai.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Pendapatan Asli Daerah**

##### **2.1.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

Berdasarkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang membahas tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 yang membahas tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (Budianto, B. & Alexander, 2016).

Kemampuan daerah dalam menggali dan memanfaatkan potensi daerah untuk menghasilkan pendapatan asli daerah tentunya dapat meningkatkan pendapatan daerah. Pendapatan asli daerah yang dihasilkan daerah memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan sehingga pemerintah daerah mampu meminimalkan ketergantungannya terhadap bantuan pendanaan yang bersumber dari pusat. Tingkat belanja modal (pembangunan) yang tinggi memberikan gambaran dari infrastruktur dan sarana yang dibangun (Saragih, 2020).

Menurut Baldrice (2017:23) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah atau yang selanjutnya disebut PAD merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber sumber daerah dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah atau perundangundangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

Menurut Carunia (2017:119) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, semakin tinggi peranan PAD dalam struktur keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya.

Menurut Carunia (2017:2) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah bersumber dari pendapatannya yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah dikatakan baik untuk memenuhi pembiayaan pembangunan daerahnya apabila pencapaian persentasenya melebihi 70% dari total penerimaan PAD.

Adapun kesimpulan Pendapatan Asli Daerah menurut pendapat di atas yang disimpulkan penulis bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari berbagai sumber-sumber pendapatan diantaranya pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain yang sah yang ada di daerah dengan berdasarkan peraturan daerah yang ada di Kota Bogor.

Dengan demikian pendapatan asli daerah merupakan sumber pendapatan yang asli berasal dari potensi daerah. pemerintah daerah dapat menggali sumber pendapatan asli daerah tersebut secara optimal yang sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku yang terdiri atas: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain Pad yang sah.

### **2.1.2. Sumber Pendapatan Pendapatan Asli Daerah**

Berdasarkan uraian tersebut maka kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan yaitu :

#### **1. Pajak Daerah**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menjelaskan pajak daerah merupakan kontribusi yang sifatnya wajib diberikan kepada suatu daerah dan bersifat memaksa serta berdasarkan undang-undang yang berlaku dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung.

Lohonauman (2016) Pajak Daerah merupakan salah satu andalan Pendapatan Asli Daerah disamping Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Lainnya yang Dipisahkan. Pengertian pajak daerah dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 pasal 1 (angka 6), disebutkan bahwa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk Membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Mardiasmo, (2016:14) menerangkan pajak daerah adalah iuran atau pungutan wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang diberikan kepada daerah dengan tanpa imbalan langsung yang diterima berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku yang tujuannya untuk membangun daerah demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pajak daerah pada dasarnya merupakan suatu pungutan wajib yang diberikan kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau suatu badan yang bersifat memaksa berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku serta tidak memperoleh manfaat yang dirasakan secara langsung pada saat kita membayar pajak yang tujuannya adalah untuk memberikan peningkatan pelayanan kepada publik.

Dalam buku Perpajakan Terbaru Mardiasmo, (2016:15) ada beberapa yang termasuk dalam kategori Pajak Provinsi, yaitu :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- d. Pajak Air Permukaan



e. Pajak Rokok

Jenis Pajak Provinsi bersifat limitatif yang berarti bahwa provinsi tidak bisa memungut pajak lain selain yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Kenyataannya, provinsi dapat untuk tidak memungut pajak yang telah ditetapkan apabila hasil yang didapat kurang memadai. Besarnya tarif pajak provinsi yakni ditetapkan secara seragam untuk seluruh Negara Indonesia sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001.

Mardiasmo, (2016:15) Menerangkan Pemerintah Daerah dalam kewenangannya dapat memungut beberapa jenis pajak, yaitu seperti:

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pajak Kabupaten/Kota tidak bersifat limitatif, artinya bahwa Kabupaten/Kota diberi kebebasan dan peluang dalam menggali segala bentuk sumber dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah.

## **2. Retribusi Daerah**

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 Ayat 64 : “Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan”.

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 memberikan kewenangan kepada Daerah secara luas, nyata, dan bertanggungjawab untuk mengelola sumber Keuangannya sendiri. Dalam menggali keuangannya tersebut tidak terlepas dari Peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar kebijakan Pemerintah Dalam mengelola sumber pendapatan asli daerahnya. Retribusi daerah sebagai salah Satu sumber pendapatan asli daerah sebagai mana dijelaskan dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 sudah semestinya diperhatikan daerah disamping sumber-sumber yang lain.

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah terbagi menjadi tiga jenis yaitu sebagai berikut :

a. Retribusi Jasa Umum

Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan.
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
6. Retribusi Pelayanan Pasar
7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
10. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
11. Retribusi Pengolahan Limbah Cair
12. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
13. Retribusi Pelayanan Pendidikan
14. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

b. Retribusi Jasa Usaha

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
2. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
3. Retribusi Tempat Pelelangan
4. Retribusi Terminal
5. Retribusi Tempat Khusus Parkir
6. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
7. Retribusi Rumah Potong Hewan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
8. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
9. Retribusi Penyeberangan di Air
10. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

c. Retribusi Perizinan Tertentu:

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
3. Retribusi Izin Gangguan
4. Retribusi Izin Trayek
5. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

**3. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan**

Jenis hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan menurut (Erlina dan Rasdianto, 2015) adalah “Dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara/BUMN, dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat”.

Dari perspektif ini, maka jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup :

1. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah (BUMD).
2. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara (BUMN).
3. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

#### **4. Lain-lain PAD yang sah**

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan bagian dari pendapatan daerah, Menurut (Erlina dan Rasdianto, 2015) menyatakan bahwa Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan sebagai berikut:

1. Hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan
2. Jasa giro
3. Pendapatan bunga
4. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah
5. Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan pengadaan barang, dan jasa oleh daerah
6. Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
7. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
8. Pendapatan denda pajak
9. Pendapatan denda retribusi
10. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
11. Pendapatan dari pengembalian
12. Fasilitas sosial dan umum
13. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan

14. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan

### 2.1.3 Pengukuran Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pada penelitian ini Pendapatan Asli Daerah diukur menggunakan Rasio Efektivitas Pendapat Asli Daerah, menurut Mahmudi (2016:170) Rasio Efektivitas Pendapatan dihitung dengan cara membandingkan realisasi pendapatan dengan target penerimaan pendapatan yang di anggarakan. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Rasio efektivitas pendapatan menunjukkan kemampuan pemerintah dalam memobilisasi penerimaan pendapatan sesuai dengan yang ditargetkan. Secara umum, nilai efektivitas pendapatan dapat di kategorikan sebagai berikut :

- Sangat Efektif : > 100%
- Efektif : 100%
- Cukup Efektif : 90% - 99%
- Kurang Efektif : 75% - 89%
- Tidak Efektif : < 75%

## 2.2 Dana Perimbangan

### 2.2.1 Pengertian Dana Perimbangan

Kebijakan pemerintah pusat yang memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam program otonomi daerah ini tentunya meningkatkan tanggung jawab pengelolaan program pada pemerintah daerah, program kerja yang sebelumnya ada dalam kebijakan pemerintah pusat, kini didelegasikan secara langsung kepada pemerintah daerah. Hal ini tentunya berimplikasi kepada peningkatan kebutuhan anggaran pemerintah daerah dalam membiayai program kerja yang meningkat tersebut. Maka untuk menciptakan satu sistem yang adil dan proporsional diterbitkanlah Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang merupakan penyempurnaan dari Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Merujuk pada pengertian Dana Perimbangan dalam Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 18 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Dana Perimbangan diartikan sebagai dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan bertujuan untuk menciptakan

keseimbangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan antara pemerintah daerah.

Adapun kesimpulan dana perimbangan, bentuk perimbangan keuangan adalah adanya dana perimbangan yang dimulai dari pusat. Dana perimbangan diberikan oleh kepala daerah untuk mendanai kebutuhan daerah guna tercapainya perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta antar pemerintah daerah sebagai bagian dari pelaksanaan desentralisasi yang dananya berasal dari pendapatan APBN yang diberikan.

### **2.2.2. Komponen Dana Perimbangan**

Dana perimbangan terdapat pada RKA dan DPA SKPD Badan Pengelola Keuangan dan tidak dapat terdapat di SKPD yang lain. Dana perimbangan terdiri dari:

#### **1. Dana Alokasi Umum (DAU)**

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 bahwa Dana Alokasi Umum yang biasa disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pembagian Dana Alokasi Umum berdasarkan penghasilan daerah yang cenderung mengalami ketimpangan antar daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Pengalokasian Dana Alokasi Umum bagi daerah yang potensi fiskalnya besar namun kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh Dana Alokasi Umum yang relatif kecil. Sebaliknya, daerah yang memiliki potensi fiskalnya kecil namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh Dana Alokasi Umum relatif besar.

Rachim, (2015:19) Mengatakan Dana Alokasi Umum merupakan salah satu sumber pendapatan Negara yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai upaya pemerataan serta keadilan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Artinya bahwa, dana alokasi umum tersebut yang diberikan secara ketentuan yang berlaku oleh pemerintah pusat untuk digunakan dalam rangka pemerataan daerah sekaligus diharapkan dapat memberikan pelayanan yang baik sesuai kebutuhan masyarakat.

Dari pengertian dan tujuan diatas disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk provinsi dan kabupaten/kota dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. DAU disalurkan dengan cara pemindahan dari rekening kas umum Negara ke rekening kas umum daerah. Penyaluran DAU dilaksanakan setiap bulan masing-masing sebesar  $\frac{1}{2}$  dari Alokasi DAU daerah yang bersangkutan yang diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia.

## **2. Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Rachim, (2015:19) Menyatakan Dana Alokasi Khusus dijelaskan sebagai dana yang berasal dari pendapatan APBN yang kemudian diperuntukan kepada daerah dengan tujuan untuk membantu berjalannya kegiatan khusus yang dalam hal ini merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

DAK dapat dialokasikan dari APBN kepada Daerah tertentu untuk membiayai dana dalam APBN, yang dimaksud sebagai daerah tertentu adalah daerah-daerah yang mempunyai kebutuhan yang bersifat khusus. Pengalokasian DAK memperhatikan ketersediaan dana dalam APBN berarti bahwa besaran DAK tidak dapat dipastikan setiap tahun. DAK bertujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan merupakan prioritas nasional, sesuai dengan fungsi yang merupakan perwujudan tugas pemerintahan dibidang tertentu, khususnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat.

Dana Alokasi Khusus (DAK) (Karyadi, 2017:56) diperuntukkan untuk merealisasikan program-program nasional didaerah serta membantu daerah dalam mendanai kebutuhan pelayanan masyarakat seperti pelayanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur masyarakat dalam rangka mendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran prioritas nasional. Pemerintah Daerah diwajibkan untuk mengalokasikan dana pendamping sebesar 10% dari nilai Dana Alokasi Khusus yang diterimanya untuk kegiatan fisik (Karyadi, 2017).

Menteri Keuangan mengungkapkan tentang dana alokasi khusus yang pada masa sekarang sangat berpengaruh terhadap berjalannya pembangunan di daerah, dana alokasi khusus itu termasuk dari dana perimbangan yang dialokasikan kepada daerah demi tercapainya tujuan tertentu yang diperoleh dari pendapatan APBN.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 menjelaskan bahwa dalam dana alokasi khusus mempunyai kriteria penghitungan alokasi untuk masing-masing daerah untuk dana alokasi khusus untuk masing-masing daerah berikut penjelasannya:

- a. Kriteria umum, dilakukan dengan berdasarkan potensi disetiap daerah yang terlihat dalam penerimaan pendapatan APBD setelah dikurangi belanja pegawai negeri sipil daerah. Kemampuan keuangan daerah dihitung berdasarkan indeks fiskal netto. Daerah yang telah memenuhi kriteria umum yang dimaksud adalah daerah dengan indeks fiskal netto tertentu yang ditetapkan setiap tahun.
- b. Kriteria khusus, dilakukan berdasarkan peraturan perundangundangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus serta karakteristik daerah. Menteri keuangan menjelaskan bahwa kriteria khusus memiliki rumus untuk mengatur keseimbangan naik turunnya pendapatan diwilayah setempat dengan melihat masukan dari Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional serta Pimpinan Lembaga terkait.

- c. Kriteria teknis, dilakukan berdasarkan sebuah petunjuk dari kegiatan yang sudah dibuat dalam kegiatan khusus yang akan didanai dengan dana alokasi khusus. Kriteria teknis dirumuskan berdasarkan indeks teknis oleh Menteri terkait. Menteri tersebut kemudian menyampaikan kriteria teknis yang dimaksud kepada Menteri Keuangan.

### **3. Dana Bagi Hasil (DBH)**

Berdasarkan UU No. 33 tahun 2004 tentang Dana Perimbangan, dana bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Dana yang bersumber dari pajak terdiri atas pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan pajak penghasilan (PPh), sedangkan dana yang bersumber dari sumber daya alam meliputi kehutanan, mineral dan batu bara, minyak bumi dan gas bumi, pengusahaan panas bumi dan perikanan. Tujuan Dana Bagi Hasil adalah untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. Dana Bagi Hasil merupakan sumber pendapatan daerah yang potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari Pendapatan Asli Daerah selain Dana Alokasi Umum dan Dana bagi hasil. Pendapatan daerah yang berupa Dana Bagi Hasil tentu harus digunakan oleh pemerintah daerah untuk membangun dan mensejahterakan masyarakat melalui pengelolaan kekayaan daerah yang proposional dan profesional serta membangun infrastruktur yang berkelanjutan, salah satunya digunakan untuk belanja modal. Maka semakin besar Dana Bagi Hasil yang didapat suatu daerah maka daerah tersebut cenderung memiliki belanja modal yang besar pula dikarenakan pemerintah daerah mendapatkan tambahan pendapatan yang didapat dari dana perimbangan tersebut. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Junaedy (2015), Susanti dan Fahlevi (2016), menunjukkan bahwa dana bagi hasil berpengaruh terhadap belanja modal.

#### **1. Dana Bagi Hasil Pajak**

Dana ini merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak terdiri atas:

1. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Penerimaan negara dari Pajak Bumi dan Bangunan dibagi dengan imbalan 90% untuk daerah dan 10% untuk pemerintah. Bagian untuk daerah 90% dibagi dengan rincian 16,2 % untuk provinsi, 64,8% untuk kabupaten/kota, dan 9% untuk biaya pemungutan. Sedangkan bagian pemerintah yang 10% dialokasikan untuk seluruh kabupaten/kota, dengan rincian 6,5% dibagi secara merata kepada seluruh kabupaten/kota, dan 3,5% dibagikan sebagai insentif kepada kabupaten/kota yang realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan.

2. Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Dana Bagi Hasil dari penerimaan BPHTB sebesar 80% dengan rincian 16% untuk daerah Provinsi yang disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi, dan 64% untuk daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan 20% bagian pemerintah dari penerimaan BPHTB dibagikan dengan sama rata untuk seluruh Kabupaten/Kota.
3. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Dana Bagi Hasil dari penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 dibagi dengan imbalan sebesar 20% dengan rincian 8% untuk Provinsi dan 12% untuk Kabupaten/Kota. Penyaluran Dana Bagi Hasil PBB dan BPHTB dilaksanakan berdasarkan realisasi penerimaan PBB dan BPHTB tahun anggaran berjalan dengan 3 tahap yaitu bulan April, Agustus dan November. Sedangkan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 dilaksanakan berdasarkan prognosa realisasi penerimaan PPh WPOPND dan Pasal 21 tahun anggaran berjalan serta dilaksanakan secara triwulan. Penetapan alokasi Dana Bagi Hasil Pajak ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Dana Bagi Hasil pajak itu sendiri disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah.

## **2. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)**

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber daya Alam) terdiri atas:

1. Sumber Daya Alam Kehutanan Penerimaan dari sektor Kehutanan yang diperoleh dari penerimaan Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang dibagi dengan imbalan 20% untuk pemerintah dan 60% untuk daerah. Sedangkan penerimaan yang berasal dari Dana reboisasi dibagi dengan imbalan sebesar 60% untuk pemerintah dan 40% untuk daerah.
2. Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Penerimaan diperoleh dari penerimaan iuran tetap dan penerimaan iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi. Penerimaan pertambangan umum yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan dibagi dengan imbalan 20% untuk pemerintah dan 80% untuk daerah.
3. Sumber Daya Alam Perikanan Penerimaan dari sektor perikanan yang diperoleh dari penerimaan pungutan perusahaan perikanan yang dibagi dengan imbalan 20% untuk pemerintah dan 80% untuk seluruh kabupaten/kota.
4. Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Penerimaan dari sektor pertambangan minyak bumi yang diperoleh dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya, dibagi dengan imbalan 84,5% untuk pemerintah dan 15,5% untuk daerah.



5. Sumber Daya Alam Pertambangan Gas Bumi Penerimaan dari sektor pertambangan gas bumi yang diperoleh dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya, dibagi dengan imbalan 69,5% untuk pemerintah dan 30,5% untuk daerah.
6. Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Pertambangan panas bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan yang merupakan penerimaan negara bukan pajak, dibagi dengan imbalan 20% untuk pemerintah dan 80% untuk daerah. Dana bagi hasil dari penerimaan pertambangan panas bumi yang dibagikan kepada daerah sebesar 80% dengan imbalan 16% untuk provinsi yang bersangkutan, 32% untuk kabupaten/kota penghasil, dan 32% untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

### 2.2.3 Pengukuran Dana Perimbangan

Dana Perimbangan merupakan dana yang di transfer oleh pemerintah pusat untuk dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dalam penelitian ini dana perimbangan diukur menggunakan rasio ketergantungan daerah, menurut Mahmudi (2016:170) rasio ketergantungan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer dana perimbangan yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah.. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Dana Perimbangan}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Rasio ketergantungan daerah ini untuk menunjukkan seberapa daerah bergantung kepada pemerintah pusat. Semakin tinggi rasio ini maka makin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Menurut Depdagri, 1996 dalam (Wahap dkk, 2017) Kriteria nilai rasio ketergantungan daerah adalah sebagai berikut :

- Sangat Rendah : 0% - 10%
- Rendah : 10% - 20%
- Sedang : 20% - 30%
- Cukup : 30% - 40%
- Tinggi : 40% - 50%
- Sangat Tinggi : > 50%

## 2.3 Belanja Pegawai

### 2.3.1 Pengertian Belanja Pegawai

Menurut Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), “Belanja pegawai adalah kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta pegawai

honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan baik sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah”. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, “Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Sedangkan menurut Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja pegawai merupakan belanja untuk pengeluaran kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Termasuk dalam kelompok belanja pegawai adalah pengeluaran-pengeluaran untuk gaji dan tunjangan-tunjangan, lembur, honorarium dan vakasi. Gaji dan tunjangan adalah bentuk pengeluaran untuk kompensasi yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah berupa gaji pokok dan berbagai tunjangan yang diterima berkaitan dengan jenis dan sifat pekerjaan yang dilakukan baik dalam bentuk uang maupun barang.

### **2.3.2 Klasifikasi Belanja Pegawai**

Belanja pegawai bagi pegawai negeri baik di tingkat daerah maupun pusat terdiri dari: Gaji, Tunjangan, Honorarium.

#### **1. Gaji**

Gaji adalah suatu bentuk balas jasa ataupun penghargaan yang diberikan secara teratur kepada seorang pegawai atas jasa dan hasil kerjanya. Perincian detail gaji PNS disesuaikan menurut golongan yang terendah hingga golongan tertinggi ditetapkan berdasarkan PP no.8 tahun 2009.

#### **2. Tunjangan**

Tunjangan PNS merupakan pendapatan sah yang diterima seorang PNS sesuai jabatan dan status. Berikut ini jenis tunjangan PNS:

- a. Tunjangan keluarga untuk suami/istri sebesar 10 % dari gaji pokok, sedang anak 2% dengan maksimal yang dapat diajukan 2 anak.
- b. Tunjangan pangan sebesar nilai beras per 10 kg/orang yang masuk daftar gaji.
  - Tunjangan jabatan, merupakan tunjangan bagi PNS yang diangkat dalam jabatan struktural maupun fungsional.

#### **3. Honorarium**

Honorarium adalah pembayaran atas jasa yang diberikan pada suatu kegiatan tertentu. Pelaksanaan pemberian honorarium akan diatur berdasarkan kebutuhan dan kemajuan pelaksanaan pekerjaan. Hal ini dimaksudkan agar:

- a. Pembayaran honorarium dilakukan berdasarkan masa kerja efektif dari tim/panitia (sesuai prestasi pelaksanaan kegiatan)

- b. kerja tim/panitia didasarkan pada perkiraan lamanya waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan sampai dengan output tercapai.

### 2.3.3 Pengukuran Belanja Pegawai

Dalam penelitian ini, Belanja pegawai diukur menggunakan Rasio Aktivitas Belanja Pegawai dengan cara membandingkan total belanja pegawai dengan total belanja daerah (Halim&Kusufi 2014). Rasio Ini di rumuskan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Total Belanja Pegawai}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Rasio Aktivitas menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja Pegawai. Menurut Madiasmo, 1999 dalam (Utomo 2011) Kriteria nilai rasio ini dapat adalah sebagai berikut :

- Baik : Dibawah 40%
- Cukup Baik : 40% - 80%
- Kurang Baik : 80% - 100%

## 2.4 Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini adalah merupakan penelitian yaitu menjelaskan hubungan variabel-variabel penelitian dengan pengujian hipotesis yang telah dirumuskannya. Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan yang terdapat pada penelitian terdahulu sehingga nantinya hasil penelitian ini dapat mengisi area kekosongan sekaligus juga sebagai melaporkan teori yang baru dan wawasan kajian teoritis. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama meneliti tentang pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan.

Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu Adalah diantaranya, variabel yang digunakan pada penelitian ini ada 2 yang mana Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menggunakan lebih dari dua bahkan Menggunakan dana perimbangan (Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana , Dana Alokasi Bagi Hasil) selanjutnya yang paling mendasar ialah objek penelitian belanja modal, belanja daerah, pertumbuhan Ekonomi, dan penelitian kali ini mendeskripsikan pengaruh pendapatan asli daerah Dan dana perimbangan terhadap belanja pegawai untuk ingin mengetahui Seberapa besarnya tingkat pengaruhnya belanja pegawai dipengaruhi Dua variabel tersebut. Dua variabel dalam penelitian ini memang begitu sederhana Dan sangat mudah untuk diketahui berpengaruh apa tidak tetapi secara sederhana Tanpa menelaah teori orang lain akan mengetahui bahwa pendapatan asli daerah dan dana perimbangan sangat tidak berpengaruh tetapi penelitian ini ingin membuktikan seberapa besar tidak pengaruhnya.

Adapun ringkasan yang dapat dilihat pada tabel 2.1 mengenai kesimpulan Perbedaan dan persamaan pada penelitian terdahulu dan penelitian ini , sebagai Berikut:

Tabel 2. 1  
Review Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Ricky Trianda (2017) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Jumlah Pegawai Terhadap Alokasi Belanja Pegawai (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kot a Di Sumatera Utara)	Variabel Independen : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus  Variabel Dependen : Alokasi Belanja Daerah	Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Alokasi Belanja Daerah	Metode Penelitian Kausatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan jumlah pegawai berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja pegawai. Secara parsial pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan jumlah pegawai berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja pegawai, tetapi dana alokasi khusus berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap alokasi belanja pegawai.

NO	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
2	Redha Fauriza (2015) Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Perimbangan Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara Periode Tahun 2009-2013	<p>Variabel Independen :</p> <p>Pendapatan Asli Daerah, Dana Peimbangan, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus</p> <p>Variabel Dependen :</p> <p>Alokasi Belanja Modal</p>	Pendapatan Asli Daerah, Dana Peimbangan, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Alokasi Belanja Modal	Metode Penelitian Kausal dan Bersifat Replikasi terhadap penelitian terdahulu	<p>Hasil penelitian membuktikan bahwa secara parsial Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Modal. Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan negatif terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Modal. Sedangkan secara simultan Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Sisa Lebih Pembiayaan</p>

NO	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
					Anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian Belanja Modal.
3	Priambudi (2016) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Pulau Jawa Tahun 2013	<p>Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum</p> <p>Variabel Dependen : Belanja Modal</p>	Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Belanja Modal	Metode Penelitian Kausal Komparatif	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa secara parsial PAD dan DAU berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal, dan secara simultan PAD dan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal..
4	Budi Utami (2018) Pengaruh Kinerja Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Koa Di Provinsi Daerah	<p>Variabel Independen : Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Belanja Pegawai</p> <p>Variabel Dependen : Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah</p>	Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Belanja Pegawai, Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	Metode Penelitian Kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Sedangkan belanja modal dan belanja pegawai berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada pemerintah

NO	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	Istimewa (Yogyakarta)				Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta.
5	Susanti & Fahlevi (2016) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Wilayah Aceh)	<p>Variabel Independen :</p> <p>Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil</p> <p>Variabel Dependen :</p> <p>Belanja Modal</p>	Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Belanja Modal	Analisis regresi linear berganda	Hasil Penelitian Ini Menunjukkan Bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil secara bersama-sama Berpengaruh terhadap belanja modal.
6	Novianto & Hanafiah, (2015) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.	<p>Variabel Independen :</p> <p>Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan (Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil)</p> <p>Variabel Dependen :</p> <p>Belanja Modal</p>	Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan (Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil), Belanja Modal	Metode Penelitian Kausalitas	Hasil Penelitian Ini Menunjukkan Bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Tingkat Keefektifitas Keuangan Daerah Tahun Sebelumnya secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Modal. Sedangkan Kemandirian Keuangan

NO	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
					Daerah Tahun sebelumnya tidak berpengaruh terhadap belanja modal
7	Imelda Amung (2016) Pengaruh Pendapatan Asli, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten dan Bogor Tahun 2010-2014	<p>Variabel Independen : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus</p> <p>Variabel Dependen : Belanja Daerah</p>	Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus, Belanja Daerah	Metode Penelitian Deskriptif Kuantitatif	Hasil Penelitian Ini Menunjukkan Bahwa pengujian secara parsial dengan uji T menghasilkan PAD, DAU, memiliki pengaruh terhadap belanja daerah. Pengujian dengan Uji F mendapatkan hasil secara bersama sama PAD, DAU, DAK memiliki pengaruh terhadap Belanja daerah.
8	Prastiwi, Ayu, Nurlaela & dan Chomsatu, (2016) Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Pegawai Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Surakarta	<p>Variabel Independen : Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Pegawai</p> <p>Variabel Dependen : Belanja Modal</p>	Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Pegawai, Belanja Modal	Metode Penelitian Kuantitatif	Hasil Penelitian Ini Menunjukkan Bahwa Belanja Pegawai berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal. Sementara Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal.



NO	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
					Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal
9	Syukri Hinaya, (2019) Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi khusus terhadap Anggaran Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota Sulawesi selatan	Variabel Independen : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus  Variabel Dependen : Belanja Modal	Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja Modal	Metode Penelitian terapan dengan data kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi (X1), pendapatan asli daerah (X2), dana alokasi umum (X3) dan dana alokasi khusus (X4) berpengaruh secara terhadap anggaran belanja modal (Y). Sedangkan, pengujian model secara parsial, hanya variabel PAD (X2) yang berpengaruh secara signifikan terhadap belanja anggaran modal (Y). Sedangkan, pertumbuhan ekonomi (X1), dana alokasi umum (X3) dan dana alokasi khusus (X4) tidak secara terhadap berpengaruh signifikan

NO	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
					tingkat kemajuan daerah (Y).
10	Daud Wido Immanuel Panggabean (2017) Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tahun 2011-2015.	<p>Variabel Independen : Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan.</p> <p>Variabel Dependen : Pertumbuhan Ekonomi</p>	Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pertumbuhan Ekonomi	Penelitian ini menggunakan data regresi panel dan jenis data yang digunakan data sekunder	Hasil Penelitian Ini Menunjukkan Bahwa PAD, DBH, dan DAU berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, variabel DAK tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung
11	Christian Donarich Natanael (2017) Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Survei Pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat periode 2011 - 2015) Pengaruh	<p>Variabel Independen : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum</p> <p>Variabel Dependen : Pertumbuhan Ekonomi</p>	Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Pertumbuhan Ekonomi	Metode Analisis Kuantitatif	Pendapatan Asli Daerah memiliki korelasi positif dan berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada kota/kabupaten di provinsi Jawa Barat periode 2011-2015 dan Dana Alokasi Umum memiliki korelasi positif dan berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada kota/kabupaten di provinsi Jawa

NO	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
					Barat periode 2011-2015
12	Budianto, B & Alexander (2016) Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara	<p>Variabel Independen : Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan</p> <p>Variabel Dependen : Kinerja Keuangan Pemerintah</p>	Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Kinerja, Keuangan Pemerintah	Metode Analisis Regresi Linear Berganda	<p>Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah baik secara simultan maupun parsial. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah yang berarti kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang mengakibatkan kenaikan Dana Perimbangan menurunkan</p>

NO	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
					kinerja keuangan pemerintah daerah.
13	Harahap (2017) Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara	Variabel Independen : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi hasil.  Variabel Dependen : Indeks Pembangunan Manusia	Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi hasil, Indeks Pembangunan Manusia	Metode Analisis Regresi Berganda	Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa DAU, DAK, dan DBH berpengaruh secara simultan konsisten dengan hipotesis penelitian.
14	Elisabeth (2018) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah Serta Analisis Flypaper Effect Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Barat	Variabel Independen : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil  Variabel Dependen : Belanja Daerah	Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Belanja Daerah	Metode Analisis Regresi Linear Berganda	Hasil Penelitian Ini Menunjukkan Bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Sama Sama Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Belanja Daerah. Dana Bagi Hasil Berpengaruh Positif Tetapi Tidak Signifikan Terhadap Belanja Daerah.
15	Asti Mutiara (2020) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah,	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum,	Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi		Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli

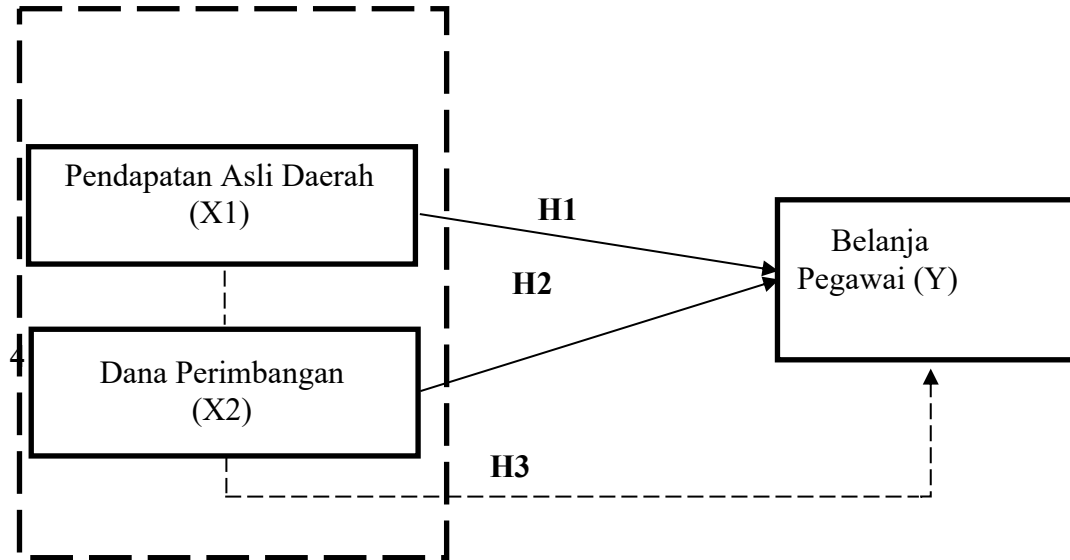
NO	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2015-2019)	Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil  Variabel Dependen: Tingkat Belanja Modal	Khusus, Dana Bagi Hasil, Belanja Modal		daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, dana alokasi khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal dan dana bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

## 2.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka pikir merupakan model konseptual akan teori yang saling berhubungan satu sama lain terhadap berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Adapun variabel-variabel yang diamati dalam penelitian ini meliputi variabel bebas (Independen) yaitu pendapatan asli daerah dan, dana perimbangan terhadap

variabel terikat (Dependen) yaitu belanja pegawai. Kerangka pemikiran ini digunakan untuk mempermudah jalan pemikiran terhadap permasalahan yang akan dibahas dan menggambarkan pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Adapun kerangka pemikiran penelitian ini digambarkan pada model berikut ini:



Gambar 2. 1

### Kerangka Pemikiran

Dari kerangka pemikiran tersebut menjelaskan bahwa yang akan di uji dalam penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris apakah ada pengaruh Pendapatan Asli Daerah ( $X_1$ ) terhadap belanja pegawai ( $Y$ ), pengaruh Dana Perimbangan ( $X_2$ ) terhadap belanja pegawai ( $Y$ ), serta apakah ada pengaruh secara simultan kedua variabel independen yaitu pendapatan asli daerah ( $X_1$ ) dan dana perimbangan ( $X_2$ ) terhadap Belanja Pegawai ( $Y$ ).

Berikut ini uraian konsep variable-variabel independen yang mempengaruhi variable dependen dalam penelitian ini :

#### 2.5.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Pegawai

Pendapatan Asli Daerah yang dimiliki setiap daerah melalui penerimaan daerah dari berbagai aspek, diantaranya Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah, sumber penerimaan daerah ini dikelola langsung oleh pemerintah daerah dengan tujuan untuk membiayai program pemerintahan yang telah disusun sebelumnya agar proses desentralisasi dapat berjalan dengan baik. Secara umum Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap daerah berbeda-beda.

Dalam penelitian Akbar dkk (2016) dalam jurnalnya menyatakan bahwa semakin tinggi PAD yang diperoleh pemerintah provinsi sumatera selatan akan meningkatkan alokasi belanja pegawai. Hal ini terbukti semakin banyak PAD yang didapat semakin memungkinkan daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan belanjanya sendiri tanpa

harus tergantung dari pusat, Jika PAD meningkat, maka dana yang dimiliki daerah akan meningkat pula, sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi-potensi daerah yang dimiliki dan akan mengurangi ketergantungan dana dari pemerintah pusat.

### **2.5.2 Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Pegawai**

Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Daerah yang memiliki pendapatan asli daerah yang relatif kecil, jalannya roda pemerintahan akan bergantung pada tersedianya dana perimbangan. Semakin besar dana perimbangan yang diterima oleh pemerintah daerah maka akan semakin besar pula belanja daerah yang akan dikeluarkan (Halim, 2012). Dana perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Dalam penelitian Aminus (2018) dalam jurnalnya menyatakan bahwa naiknya dana perimbangan akan berpengaruh kepada belanja daerah di kabupaten ogan ilir. Hal ini membuktikan bahwa pemerintahan daerah masih memiliki ketergantungan terhadap dana perimbangan dari pemerintah pusat dalam mengalokasikan belanja daerahnya.

### **2.5.3 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Pegawai**

Kebijakan otonomi daerah memberikan wewenang yang lebih luas Kepada pemerintah daerah dalam mengatur dan mengembangkan potensi Yang ada di daerahnya . Peningkatan ini tentunya sejalan dengan Meningkatnya beban pemerintah daerah dalam menjalankan roda Pemerintahan . Bila sebelumnya pemerintah daerah hanya menjadi Kepanjangan tangan dari pemerintah pusat, yang dimana semua program Pemerintahan disesuaikan dengan kebijakan nasional. Maka saat ini Sebagian besar kewenangan dalam merencanakan program sampai dengan Pelaksanaanya ada pada pemerintah daerah. Maka dari pada itu satu sisi Kebijakan ini menjadi peluang bagi pemerintah daerah untuk melakukan Inovasi dalam membuat program yang paling sesuai dengan kondisi Daerahnya . Disisi lain otonomi ini menjadi tantangan atau bahkan peningkatan beban bagi pemerintah daerah karena dalam pelaksanaannya dibutuhkan kesiapan matang bagi pemerintah daerahnya . Sejalan dengan peningkatan wewenang pemerintah daerah dalam membuat kebijakan dan pelaksanaan roda pemerintah , pemerintah juga dituntut untuk mampu meningkatkan sumber pendapatan asli daerahnya untuk bisa membiayai kebutuhan belanja daerah secara mandiri . Karena Salah satu dari tujuan otonomi daerah adalah tingkat kemandirian Keuangan pemerintah daerah yang semakin tinggi dalam memenuhi kebutuhan belanja daerahnya . Berkaitan dengan belanja daerah yang ditujukan untuk Meningkatkan pelayanan publik dalam upaya untuk mendorong Pertumbuhan ekonomi ini , strategi

alokasi belanja daerah menjadi penting Untuk diperhatikan agar dapat berperan maksimal dalam meningkatkan Pertumbuhan ekonomi yang dapat menumbuhkan pendapatan asli daerah .

Agar kontribusi publik terhadap pendapatan daerah meningkat , hendaknya belanja pegawai yang merupakan bagian belanja daerah yang Ditingkatkan. Peningkatan belanja modal dalam pembangunan dan Perbaikan sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti Sektor pendidikan , kesehatan dan transportasi perlu untuk ditingkatkan Agar masyarakat bisa langsung merasakan dampak dari pembangunan ini . Peningkatan pembangunan prasarana tersebut tentu akan meningkatkan Aktifitas usaha masyarakat daerah sehingga dapat menjadi sumber Pendapatan asli daerah.

Apabila Pendapatan Asli Daerah yang merupakan sumber Pembelanjaan daerah mengalami peningkatan , maka dana yang dimiliki Oleh pemerintah daerah untuk belanja pegawai akan ikut meningkat , Peningkatan itu diiringi peningkatan kemandirian keuangan pemerintah Daerah. Yang menjadi sumber anggaran dana selain pendapatan asli Daerah adalah dana perimbangan dari pemerintah pusat. Sehingga dana Perimbangan ini memiliki keterkaitan dengan belanja daerah. menemukan bukti empiris bahwa dalam jangka panjang Transfer pemerintah pusat berpengaruh terhadap belanja modal dan Pengurangan jumlah transfer dapat menyebabkan penurunan belanja pegawai.

## **2.6 Hipotesis Penelitian**

Hipotesis merupakan dugaan sementara yang belum bisa dipastikan, sehingga harus dilakukan penelitian agar mengetahui apakah data yang diteliti menerima hipotesis penelitian atau menolaknya.

Berdasarkan kerangka Pemikiran yang telah digambarkan pada gambar 2.1 maka hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

Ha<sub>1</sub>: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Pegawai.

Ha<sub>2</sub>: Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Belanja Pegawai.

Ha<sub>3</sub>: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan berpengaruh secara simultan terhadap Belanja Pegawai



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, dimana data yang diperoleh diwujudkan dalam bentuk angka, skor, dan analisisnya menggunakan statistik. Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian maka jenis penelitian ini termasuk penelitian kausatif (*causative*), Penelitian kausatif merupakan penelitian yang menggunakan karakteristik masalah berupa hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh antara variabel independen (X) yaitu Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Perimbangan (X2) terhadap variabel dependen (Y) yaitu Belanja Pegawai dengan studi kasus pada Kota Bogor tahun 2016-2020.

#### **3.2 Objek, Unit analisis, dan Lokasi Penelitian**

##### **3.2.1 Objek**

Objek penelitian adalah suatu hal yang menjadi pokok penelitian. Objek penelitian ini adalah Laporan Realisasi APBD Kota Bogor Tahun 2016-2020.

##### **3.2.2 Unit Analisis**

Penelitian ini menggunakan unit analisis *Geographic Region*, yaitu sumber data yang analisisnya merupakan mengenai atau respon dari wilayah/daerah/negara yaitu Kota Bogor.

##### **3.2.3 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada Kota Bogor dengan memperoleh data dari situs web Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan.

#### **3.3. Jenis dan Sumber data Penelitian**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Adapun sumber data diambil dari Laporan Keuangan di Kota Bogor yang diperoleh dari Djpk Menteri Keuangan dari tahun 2016 sampai tahun 2020.

#### **3.4 Operasionalisasi Variabel**

1. Variabel Penelitian Variabel penelitian mencakup variabel apa yang diteliti. Penelitian ini menggunakan 2 (Dua) variabel bebas yaitu Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Perimbangan (X2), dan variabel terikatnya yaitu Belanja Pegawai (Y).
2. Definisi Operasional Definisi operasional merupakan petunjuk bagaimana suatu variabel diukur secara operasional di lapangan. Definisi operasional sebaiknya berasal dari konsep teori dan definisi atau gabungan keduanya, yang ada dilapangan. Untuk memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan pelaksanaan penelitian, maka perlu diberikan definisi variabel-variabel yang akan diteliti sebagai berikut:

Tabel 3. 1

## Operasionalisasi Variabel

No	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Skala
1	Pendapatan Asli Daerah (X1)	Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah	$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$ <p style="text-align: center;">(Mahmudi, 2016)</p>	Rasio
2	Dana Perimbangan (X2)	Rasio Ketergantungan Dana Perimbangan	$\frac{\text{Dana Perimbangan}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$ <p style="text-align: center;">(Mahmudi, 2016)</p>	Rasio
3	Belanja Pegawai (Y)	Rasio Aktivitas Belanja Pegawai	$\frac{\text{Belanja Pegawai}}{\text{Belanja Daerah}} \times 100\%$ <p style="text-align: center;">(Halim &amp; Kusufi, 2014)</p>	Rasio

### 3.5 Metode Penarikan Populasi dan Sampel

Menurut (Sugiyono, 2017) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, dan kemudian ditarik suatu kesimpulannya. Populasi yang menjadi objek penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Kota Bogor.

Menurut (Sugiyono, 2017) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Adapun cara pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan sampel bertujuan atau *purposive sampling*. Adapun sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah data Laporan Realisasi Anggaran tahun 2016-2020 kota Bogor.

### 3.6 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data sekunder, data dikumpulkan dengan metode dokumentasi. Ini dilakukan dengan mengumpulkan, mengklasifikasi dan menghitung data-data yang berhubungan dengan penelitian. Data yang dikumpulkan periode tahun 2016-2020.

### 3.7 Metode Pengolahan / Analisis Data

#### 1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan metode untuk mengumpulkan, mengolah, menyajikan dan menganalisa data kuantitatif secara deskriptif. Menurut (Sugiyono, 2017), “Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi dari suatu data yang

dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness (kemencengan distribusi)". Berdasarkan data olahan SPSS maka akan dapat diketahui nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata (mean) dan standar deviasi dari setiap variabel.

## **2. Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik adalah pengujian asumsi-asumsi statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linier.

### **1. Uji Normalitas**

Pengujian normalitas adalah suatu pengujian data tentang kenormalan distribusi data. Data yang terdistribusi secara normal berarti data akan mengikuti bentuk distribusi normal tersebut. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah sebuah model regresivariabel bebas (independen) dan variabel terikat (dependen) atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2016:77). Apabila suatu nilai residual tidak terdistribusi normal maka uji statistik yang dilakukan menjadi tidak valid untuk sampel kecil. Uji statistik sederhana juga dapat dilakukan dengan cara melihat nilai signifikan berdasarkan Kolmogorov-Smirnov (Prihadi, 2019:20). Uji K-S ini dilakukan dengan melihat nilai probabilitasnya, dengan ketentuan jika hasil yang didapat dari Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai signifikan diatas 0,025 maka data residual terdistribusi dengan normal. Namun apabila hasil KolmogorovSmirnov menunjukkan nilai signifikan dibawah 0,025 maka data residual terdistribusi tidak normal.

### **2. Uji Multikolinearitas**

Menurut (Ghozali, 2016) Multikolinearitas adalah situasi adanya korelasi variabel-variabel antara yang satu dengan yang lainnya. menyatakan bahwa Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar Variabel bebas (independen). Model regresi yang baik tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang menilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Untuk mengetahui ada tidaknya gejala multikolinearitas dapat dilakukan dengan cara melihat besaran korelasi antar variabel independen. Besarnya tingkat kolinearitas yang masih dapat di tolerir yaitu dengan nilai Tolerance  $> 0,10$  dan Variance Inflating Factor (VIF)  $< 10$ , hal tersebut menandakan tidak terjadi multikolinearitas antar variabel. Jika nilai Tolerance  $< 0,10$  dan VIF  $> 10$  maka terdapat gejala multikolinearitas yang tinggi.

### **3. Uji Heteroskedastisitas**

Uji Heteroskedastisitas Salah satu asumsi yang penting dari model regresi linear adalah varian residual bersifat homokedastisitas atau bersifat konstan. Menurut (Ghozali, 2016:134) menyatakan bahwa "Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas". Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat grafik scatterplot.

#### 4. Uji Autokorelasi

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data time series, sehingga dalam melakukan pengujian menggunakan uji autokorelasi. Uji autokorelasi ini bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linear ada korelasi ataupun hubungan antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 sebelumnya (Asteria, 2015). Untuk mengetahui ataupun mendeteksi ada tidaknya problem autokorelasi pada model regresi dapat dilakukan dengan menggunakan uji Durbin-Watson (DW test) yang menerapkan titik kritis yaitu batas bawah (dl) dan batas atas (du). Kriteria pengujian yang dilakukan dengan hipotesis tidak ada autokorelasi adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 2

*Tabel Durbin-Watson*

Pengambilan Keputusan Autokorelasi

Hipotesis Nol (Ho)	Apabila	Keputusan
Tidak ada autokorelasi positif	$0 < d < dl$	Menolak
Tidak ada autokorelasi positif	$dl < d < du$	Ragu-ragu
Tidak ada autokorelasi negative	$(4-dl) < d < 4$	Menolak
Tidak ada autokorelasi negative	$(4-du) < (4-dl)$	Ragu-ragu
Tidak ada autokorelasi positif/negatif	$Du < d < (4-du)$	Menerima

Sumber : Asteria, 2015

Uji autokorelasi juga dapat dilakukan melalui uji *Run Test*. Uji ini merupakan bagian dari statistic non parametric yang dapat digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Pengambilan keputusan dilakukan dengan melihat nilai Asymp. Sig (2-tailed) uji *Run Test*. Apabila nilai Asymp. Sig (2-tailed) lebih besar dari tingkat signifikan 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terdapat autokorelasi. Uji *Run Test* akan memberikan kesimpulan yang lebih pasti jika terjadi masalah pada uji Durbin-Watson.

#### 3. Regresi Linier Berganda

Untuk menguji hipotesia (Ha) metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda, karena menyangkut empat variabel independen/bebas dan satu variabel dependen/terikat, Regresi linier berganda yaitu suatu model linier regresi yang variabel dependennya merupakan fungsi linier dari beberapa variabel bebas. Regresi linier berganda sangat bermanfaat untuk meneliti pengaruh beberapa variabel yang berkorelasi dengan variabel yang diuji. Model persamaan regresi untuk menguji hipotesis dengan formulasi berikut ini:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Belanja Pegawai

a = Konstanta

X1 = Pendapatan Asli daerah (PAD)

X2 = Dana Perimbangan

b1, b2, = Koefisien Regresi PAD, Dana Perimbangan

e = Standar Error

#### 4. Uji Hipotesis

##### 1. Analisis Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Pada model linier berganda ini, akan dilihat besarnya kontribusi untuk variabel independen terhadap variabel dependennya dengan melihat besarnya koefisien determinasi totalnya (R<sup>2</sup>). Menurut (Ghozali, 2016) menyatakan bahwa Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>) adalah antara nol dan satu. Nilai R<sup>2</sup> yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen. Model regresi yang baik adalah model regresi yang koefisien determinasinya semakin tinggi atau dengan kata lain kemampuan menjelaskan dari semua variabel bebasnya terhadap perilaku variabel terikatnya yang semakin tinggi. Nilai R<sup>2</sup> Mempunyai Interval 0 sampai 1 ( $0 < R^2 < 1$ ). Semakin besar R<sup>2</sup> (mendekati 1) semakin baik hasil untuk model regresi tersebut. Dengan kata lain, jika Nilai R<sup>2</sup> yang diperoleh mendekati 1, maka semakin kuat model tersebut.

##### 2. Uji Parsial (Uji t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi-variasi variabel dependen dengan menggunakan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>0</sub>: Tidak ada pengaruh secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen.

H<sub>a</sub>: Ada pengaruh secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen. Hipotesisnya dirumuskan sebagai berikut:

1. H<sub>0</sub> = b<sub>1</sub> = 0, Artinya tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen.
2. H<sub>a</sub> = b<sub>1</sub> ≠ 0, Artinya ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen.
3. Menentukan tingkat signifikan  $\alpha$  sebesar 0,05 (5%).

Cara melakukan uji t adalah dengan membandingkan nilai statistik t hasil perhitungan (t hitung) dengan nilai t menurut tabel (t tabel). Hasil perhitungan menunjukkan apabila:

1. t hitung > t tabel, maka H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>a</sub> diterima, suatu variabel bebas secara parsial merupakan penjelas terhadap variabel terikat atau dengan kata lain variabel independen secara parsial (individu) berpengaruh terhadap variabel dependen.
2. t hitung < t tabel, maka H<sub>0</sub> diterima dan H<sub>a</sub> ditolak, suatu variabel bebas secara parsial bukan merupakan penjelas terhadap variabel terikat atau dengan kata lain

variabel independen secara parsial (individu) tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

### 3. Simultan (Uji F)

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen bersama-sama mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Pengujian simultan ini menggunakan uji F, Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen/terikat dengan menggunakan hipotesis sebagai berikut:  $H_0$ : Tidak ada pengaruh secara simultan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

$H_a$ : Ada pengaruh secara simultan antara variabel indeoenden terhadap variabel dependen. Hipotesisnya dirumuskan sebagai berikut:

1.  $H_0 = b_1 = b_2 = b_3 = b_4 = 0$ , artinya tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen.
2.  $H_a = b_1 \neq b_2 \neq b_3 \neq b_4 \neq 0$ , artinya ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen.
3. Menentukan tingkat signifikan yaitu sebesar 0,05 ( $\alpha = 5\%$ ).

Cara melakukan uji F adalah dengan membandingkan nilai statistik F hasil perhitungan (F hitung) dengan nilai F menurut tabel (F tabel). Hasil perhitungan menunjukkan apabila:

1.  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, suatu variabel bebas secara simultan merupakan penjelas terhadap variabel terikat atau dengan kata lain variabel independen secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap variabel dependen.
2.  $F_{hitung} < F_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, suatu variabel bebas secara simultan bukan merupakan penjelas terhadap variabel terikat atau dengan kata lain variabel independen secara bersama-sama (simultan) tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan terhadap Pemerintahan Kota Bogor periode 2016-2020. Pemerintahan Kota Bogor menjadi sampel yang dipilih menggunakan metode *purposive sampling* dengan berbagai kriteria yang telah ditentukan sebagaimana telah dijelaskan dalam BAB III.

##### **4.1.1 Sejarah Singkat Kota Bogor**

Kota Bogor merupakan wilayah yang masuk di Provinsi Jawa Barat dengan julukan kota hujan. Kota itu memiliki sejarah yang cukup panjang dan sangat menarik untuk diulas, mulai dari perannya jadi Ibu Kota Kerajaan Pajajaran sampai kini akhirnya menjadi kota terpenting penyanggah Ibu Kota Negara.

Kota Bogor mempunyai sejarah dan peradaban yang dimulai sejak abad IV Masehi. Sejarah Bogor sangat erat berkaitan dengan Kerajaan Pajajaran. Sejumlah tulisan sejarah menyebutkan jika Bogor menjadi pusat pemerintahan kerajaan terbesar yang menguasai bumi Pasundan pada sekitar abad 13-15 Masehi.

Kota dengan curah hujan tertinggi ini juga diyakini sebagai tempat berdirinya Kerajaan Tarumanegara. Beberapa kerajaan lain ikut bermukim di Bogor dengan alasan daerah pegunungan Bogor bisa dijadikan tempat untuk bertahan melawan serangan. Di sisi lain daerahnya yang subur memiliki akses mudah untuk jalur perdagangan.

Kerajaan Sunda memiliki ibu kota yang bernama Pajajaranan dengan letak lokasinya diyakini berada di Kota Bogor. Hal tersebut dibuktikan melalui adanya prasasti-prasasti yang ditemukan di Kota Bogor. Terdapat salah satu prasasti 1533 mengisahkan kekuasaan Prabu Surawisesa dari Kerajaan Sunda. Masuk di era kolonial Belanda, kota tersebut dikenal dengan nama Buitenzorg yang mempunyai makna tanpa kecemasan atau aman tentram. Dalam ekspedisi Belanda 1687 yang diketuai oleh Scipio dan Riebeeck berhasil memperlihatkan kembali catatan sejarah Kota Pakuan yang hilang setelah penyerbuan tentara Banten.

Proses pembangunan Jalan Raya Daendels, saat 1745 Gubernur Jenderal Gustaaf Willem Baron Van Imhoff juga membangun Istana Bogor. Selanjutnya dirinya menggabungkan 9 distrik yang meliputi Cisarua, Pondok Gede, Ciawi, Ciomas, Cijeruk, Sindang Barang, Balubur, Dramaga dan Kampung Baru ke dalam kesatuan pemerintah. Lalu kawasan tersebut dinamakan Kampung Baru Buitenzorg.

Kemudian di masa pendudukan Inggris, Istana Bogor direnovasi dan sebagian wilayahnya dijadikan kebun raya. Pada 1903 terbit UU Desentralisasi untuk menghapus sistem pemerintahan tradisional dengan sistem administrasi pemerintahan modern. Sehingga muncullah sistem *Stadsgemeente*.

Provinsi Jawa Barat disahkan pada 1925 yang memiliki 5 karesidenan, 18 kabupaten dan kotapraja. Untuk itu *buitenzorg* atau Bogor salah satu *staads gemeente* Provinsi Jawa Barat.

Beralih ke masa penjajahan Jepang, pemerintahan Kota Bogor melemah. Sebab pemerintahan dipusatkan pada tingkat karesidenan yang berkedudukan di Kota Bogor. Selain itu nama-nama lembaga pemerintahan juga diubah.

Setelah Indonesia memproklamkan kemerdekaan, nama Kota Bogor diubah menjadi Kota Besar Bogor. Hal yang mendasari ini yakni UU No.16/1950. Pada 1957 namanya berubah lagi menjadi Kota Praja Bogor.

Sampai pada akhirnya melalui UU No.18/1965 dan UU No.5/1974 berubah menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor. Hingga puncaknya Kotamadya Daerah Tingkat II Kota Bogor diubah menjadi Kota Bogor melalui UU No.22/1999.

Secara geografis Kota Bogor terletak di antara 106° 48' BT dan 6° 26' LS, kedudukan geografis Kota Bogor di tengah-tengah wilayah Kabupaten Bogor serta lokasinya sangat dekat dengan Ibukota Negara, merupakan potensi yang strategis bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dan jasa, pusat kegiatan nasional untuk industri, perdagangan, transportasi, komunikasi, dan pariwisata.

Kota Bogor mempunyai rata-rata ketinggian minimum 190 m dan maksimum 330 m dari permukaan laut. Kondisi iklim di Kota Bogor suhu rata-rata tiap bulan 26° C dengan suhu terendah 21,8° C dengan suhu tertinggi 30,4° C. Kelembaban udara 70 %, Curah hujan rata-rata setiap tahun sekitar 3.500 – 4000 mm dengan curah hujan terbesar pada bulan Desember dan Januari.

Luas Wilayah Kota bogor sebesar 11.850 Ha terdiri dari 6 kecamatan dan 68 kelurahan. Kemudian Secara Administratif kota Bogor terdiri dari 6 wilayah kecamatan, 31 kelurahan dan 37 desa (lima diantaranya termasuk desa tertinggal yaitu desa Pamoyanan, Genteng, Balungbangjaya, Mekarwangi dan Sindangrasa), 210 dusun, 623 RW, 2.712 RT dan dikelilingi oleh Wilayah Kabupaten Bogor yaitu sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kec. Kemang, Bojong Gede, dan Kec. Sukaraja Kabupaten Bogor.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kec. Sukaraja dan Kec. Ciawi, Kabupaten Bogor.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kec. Darmaga dan Kec. Ciomas, Kabupaten Bogor.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kec. Cijeruk dan Kec. Caringin, Kabupaten Bogor.

Adapun Visi dan Misi dari Pemerintahan Kota Bogor yaitu:

- Visi : *“Mewujudkan Kota Bogor sebagai Kota Ramah Keluarga”*.
- Misi :
  1. Mewujudkan Kota yang Sehat;
  2. Mewujudkan Kota yang Cerdas;
  3. Mewujudkan Kota yang Sejahtera



#### **4.1.2 Struktur Organisasi, Tugas dan Wewenang Pemerintahan Kota Bogor**

Struktur organisasi merupakan kerangka dari organisasi yang menggambarkan suatu hubungan structural yang terdapat dalam suatu organisasi setiap perusahaan/badan berbeda satu sama lain hal tersebut didasarkan pada tujuan dan organisasi perusahaan tersebut. Pembagian tugas dan tanggung jawab diadakan karena adanya ragam pekerjaan yang berbeda dari setiap bagian. Struktur Organisasi juga menentukan batasan atas tugas masing-masing individu atau golongan pada perusahaan/badan serta hubungan dan kontak antara satu haknya dalam perusahaan/badan tersebut.

Adapun tugas dan wewenang masing-masing bagian adalah sebagai berikut :

1. Walikota memiliki kewenangan sebagai pemimpin penyelenggaraan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD Kota
2. Wakil walikota bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan oleh walikota, memberi saran dan nasehat kepada walikota atas keputusan yang telah dibuat.
3. Sekretaris daerah memiliki wewenang untuk membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dengan Dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris daerah terdiri dari : Asisten Tata Praja, Asisten Administrasi Kemasyarakatan dan Pembangunan dan Asisten Administrasi Umum.
4. Asisten Tata Praja memiliki wewenang untuk memberikan pelayanan administrative dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah daerah dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah. Asisten Tata Praja membawahkan dan mengkoordinasikan : Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Hukum, Bagian Organisasi.
5. Asisten Administrasi Kemasyarakatan dan Pembangunan tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Sekretaris daerah di bidang kemasyarakatan, pengendalian program dan perekonomian. Asisten Administrasi Kemasyarakatan dan Pembangunan membawahkan dan mengkoordinasikan : Bagian Kemasyarakatan, Bagian Pengendalian Program, Bagian Perekonomian.
6. Asisten Administrasi Umum tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Sekretaris Daerah di bidang administrasi umum, keuangan Sekretariat dan hubungan masyarakat. Asisten Administrasi Umum membawahkan dan mengkoordinasikan Bagian Umum, Bagian Keuangan Sekretariat, Bagian Hubungan Masyarakat.

#### **4.2 Hasil Pengumpulan Data**

Terdapat dua variabel dalam penelitian ini yang akan diteliti secara lebih lanjut. Pertama adalah variabel independen atau variabel bebas, yaitu Pendapatan Asli Daerah(X1), dan Dana Perimbangan(X2), kedua adalah variabel dependen atau variabel terikat, yaitu Belanja Pegawai(Y) pada Kota Bogor tahun 2016-2020. Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *geografic region* yaitu sumber data yang unit analisisnya merupakan respons dari suatu wilayah atau daerah. Dalam hal ini unit analisisnya adalah daerah Kota Bogor tahun 2016 sampai dengan 2020 menggunakan data tahunan sebagai dasar penelitian.

Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kota Bogor. Sumber data yang digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data diperoleh peneliti secara tidak langsung, melalui Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Kota Bogor Tahun 2016- 2020. Berdasarkan metode penarikan sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan sampel bertujuan atau *purposive sampling*.

Berikut ini merupakan penjelasan mengenai data laporan keuangan yang telah dikumpulkan oleh peneliti berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Pegawai sebagai berikut:

#### 4.2.1 Pendapatan Asli Daerah pada Kota Bogor

Pendapatan Asli Daerah harus ditingkatkan seoptimal mungkin dalam rangka mencapai efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Pendapatan Asli Daerah diukur menggunakan rasio efektifitas pendapatan asli daerah dengan rumus sebagai berikut:

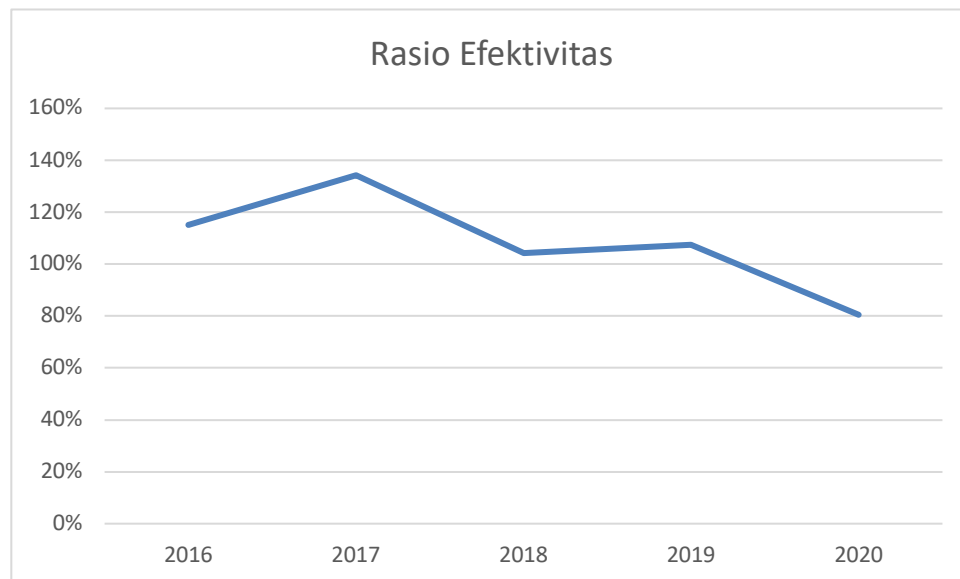
$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan PAD}}{\text{Target penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel 4. 1

Rasio Efektivitas pada Kota Bogor Tahun 2016-2020

Tahun	PAD	Target pad	Rasio Efektivitas
2016	783.873.587.219	681.623.897.863	115%
2017	978.197.741.947	728.666.344.804	134%
2018	912.197.971.288	875.230.630.511	104%
2019	1.015.884.216.919	944.394.650.807	108%
2020	872.017.242.152	1.083.412.298.220	80%
Rata-rata			108%

Sumber : Hasil Olah Data ([djk.kemenkeu.go.id](http://djk.kemenkeu.go.id))



Sumber: Diolah oleh Penulis, 2022

Gambar 4. 1

Grafik Rasio Efektivitas pada Kota Bogor Tahun 2016-2020

Tabel 4. 2

Kriteria Penilaian Efektivitas

<b>Rasio Efektivitas</b>	<b>Tingkat Efektivitas</b>
Diatas 100%	Sangat Efektif
90% - 100 %	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, 1996 dalam (wahap, 2017)

Berdasarkan tabel 4.1, nilai pendapatan asli daerah tahun 2016-2020 pada Kota Bogor cenderung fluktuatif, ini berarti Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor masih belum optimal. Rata-rata rasio efektivitas memang menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor sudah di tingkat sangat efektif tetapi terjadi penurunan yang signifikan di tahun 2020 yaitu menjadi 80% dari yang ditargetkan.

#### 4.2.2 Dana Perimbangan pada Kota Bogor

Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan bertujuan untuk mengurangi

ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar-daerah.

Dana Perimbangan diukur menggunakan Rasio Ketergantungan untuk mengukur berapa besar ketergantungan suatu daerah tersebut. Berikut adalah rumus rasio ketergantungan:

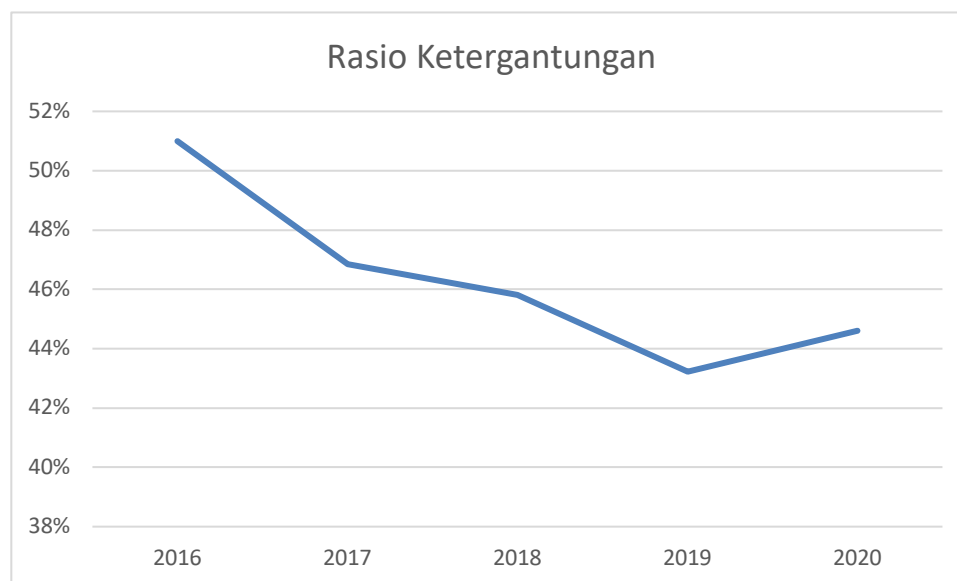
$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Dana Perimbangan}}{\text{Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 4. 3

Rasio Ketergantungan pada Kota Bogor Tahun 2016-2020

Tahun	Dana Perimbangan	Total Pendapatan Daerah	Rasio Ketergantungan
2016	1.097.614.311.436	2.152.370.082.886	51%
2017	1.072.486.473.770	2.289.359.362.675	47%
2018	1.066.762.734.201	2.328.703.432.669	46%
2019	1.106.494.405.814	2.559.857.207.794	43%
2020	1.083.171.964.899	2.428.579.503.649	45%
Rata-rata			46%

Sumber: Hasil Olah Data (djk.kemenkeu.go.id)



Sumber : Diolah oleh Penulis, 2022

Gambar 4. 2

Grafik Rasio Ketergantungan pada Kota Bogor tahun 2016-2020

Tabel 4. 4c

## Kriteria Penilaian Ketergantungan

Rasio Ketergantungan	Tingkat Ketergantungan
0% - 10%	Sangat Rendah
10% - 20 %	Rendah
20% - 30%	Sedang
30% - 40%	Cukup
40% - 50%	Tinggi
>50%	Sangat Tinggi

Sumber: Depdagri, 1996 dalam (Wahap dkk, 2017)

Berdasarkan Tabel 4.3 terlihat bahwa dana perimbangan pada Kota Bogor mengalami penurunan di tahun 2017 sampai tahun 2019 tetapi meningkat Kembali di tahun 2020. Artinya Pemerintah Kota Bogor belum maksimal mengelola keuangan daerahnya karna masih mengalami kenaikan dana tranfer dari pemerintah yang juga disebut belum bisa mandiri atau masih sangat ketergantungan. Dan rata rata dari tahun 2016 sampai 2020 dana perimbangan masih dikategorikan dalam tingkat ketergantungannya tinggi.

#### 4.2.3 Belanja Pegawai Pada Kota Bogor

Belanja Pegawai dapat diukur menggunakan rasio aktivitas. Rasio aktivitas menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja pegawai secara optimal. Berikut rumus rasio aktivitas belanja pegawai:

$$\text{Rasio Aktivitas} = \frac{\text{Belanja Pegawai}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 4. 5

## Rasio Aktivitas Belanja Pegawai

Tahun	Belanja Pegawai	Total Belanja Daerah	Rasio Aktivitas
2016	1.044.030.978.405	2.155.296.888.270	48%
2017	1.030.115.640.840	2.245.590.002.914	46%
2018	1.108.690.038.689	2.406.586.936.843	46%
2019	1.181.889.361.829	2.528.443.956.613	47%
2020	1.010.111.841.189	2.354.870.702.982	43%
Rata-rata			46%

Sumber: Hasil Olah Data (djpk.kemenkeu.go.id)



Sumber : Diolah oleh Penulis, 2022

Gambar 4. 3

Grafik Rasio Aktivitas pada Kota Bogor Tahun 2016-2020

Tabel 4. 6

Kriteria Penilaian Aktivitas

Rasio Aktivitas	Tingkat Aktivitas
Dibawah 40%	Baik
40% - 80%	Cukup Baik
80% - 100%	Kurang Baik

Sumber: Madiasmo, 1999 dalam (Utomo 2011)

Berdasarkan Tabel 4.5 diketahui bahwa total belanja daerah hampir 50% dialokasikan untuk belanja pegawai. Rasio Aktivitas belanja pegawai pada Kota Bogor tahun 2016 sampai 2022 memiliki rata rata 46% yang artinya pemerintah memprioritaskan belanja daerahnya lebih banyak kepada belanja pegawai.

### 4.3 Analisis Data

#### 4.3.1 Analisis Deskriptif Statistik

Statistik deskriptif adalah statistic yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Statistik deskriptif memberikan gambaran mengenai nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (*mean*), serta standar deviasi data yang digunakan dalam penelitian yang ditunjukkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 4. 7  
Statistik Deskriptif

	Descriptive Statistics				
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	5	783.873.587.219	1.015.884.216.919	912.434.151.905	91.088.098.693.329
DANA PERIMBANGAN	5	1.066.762.734.201	1.106.494.405.814	1.085.305.978.024	16.682.252.069.252
BELANJA PEGAWAI	5	1.010.111.841.189	1.181.889.361.829	1.074.967.572.190,40	70.257.576.585.910
Valid N (listwise)	5				

Sumber : data sekunder yang telah diolah menggunakan SPSS 25

Berikut rincian data deskriptif dari Tabel 4.1 yang telah diolah :

1. Variable Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai minimum sebesar 783.873.587.219, nilai maksimum sebesar 1.015.884.216.919, nilai rata-rata sebesar 912.434.151.905, dan standar deviasi sebesar 91.088.098.693.329 dengan jumlah pengamatan sebanyak 5.
2. Variabel Dana Perimbangan memiliki nilai minimum sebesar 1.066.762.734.201, nilai maksimum sebesar 1.106.494.405.814, nilai rata-rata sebesar 1.085.305.978.024, dan standar deviasi sebesar 16.682.252.069.252 dengan jumlah pengamatan sebanyak 5.
3. Variabel Belanja Pegawai memiliki nilai minimum sebesar 1.010.111.841.189, nilai maksimum sebesar 1.181.889.361.829, nilai rata-rata sebesar 1.074.967.572.190,40, dan standar deviasi sebesar 70.257.576.585.910 dengan jumlah pengamatan sebanyak 5.

#### 4.3.2 Uji Asumsi Klasik

Pengujian selanjutnya adalah uji asumsi klasik pada data. Sebelum melakukan pengujian regresi linier berganda perlu dilakukan lebih dahulu pengujian asumsi klasik karena model yang baik harus memenuhi kriteria BLUE (*best Linier unbiased Estimator*). Untuk itu diperlukan beberapa pengujian data diantaranya adalah sebagai berikut:

##### 4.3.2.1 Uji Normalitas

Analisis Statistik dapat digunakan untuk menguji apakah residual berdistribusi normal atau tidak. Uji statistik ini dapat digunakan melalui uji statistik non parametrik Kolmogorov Smirnov (K-S) dengan membuat hipotesis: Ho diterima residual berdistribusi normal. Ha diterima berarti data residual tidak berdistribusi normal. Apabila nilai signifikan atau probabilitas lebih besar dari 0,05, maka Ho diterima dan

sebaliknya jika nilai signifikansi atau probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka  $H_0$  ditolak atau  $H_a$  diterima. Berikut ini tabel hasil uji Kolmogorov-Smirnov (K-S):

Tabel 4. 8  
Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		5
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000732
	Std. Deviation	4.874.835.596.663.990.000
Most Extreme Differences	Absolute	.210
	Positive	.210
	Negative	-.148
Test Statistic		.210
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>
a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data. c. Lilliefors Significance Correction. d. This is a lower bound of the true significance.		

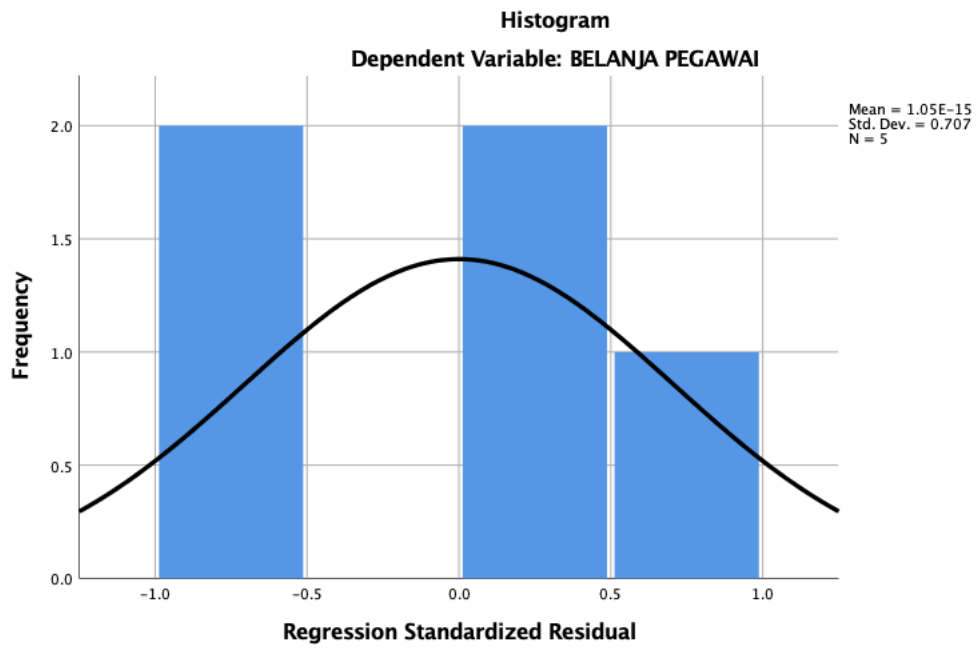
Sumber : data sekunder yang telah diolah menggunakan SPSS 25

Berdasarkan pengolahan data tersebut, nilai dari *Kolmogorov-Smirnov Z* adalah:

Dari hasil pengolahan data pada tabel 4.2 di atas, diperoleh nilai Kolmogorov-Smirnov Z sebesar 0,210 dan Asymp.Sig. (2-tailed) adalah 0,200 dan nilai ini di atas 0,05 dengan kata lain variabel residual berdistribusi normal. Semua hasil pengujian melalui analisis grafik dan statistik di atas menunjukkan hasil yang sama yaitu normal.

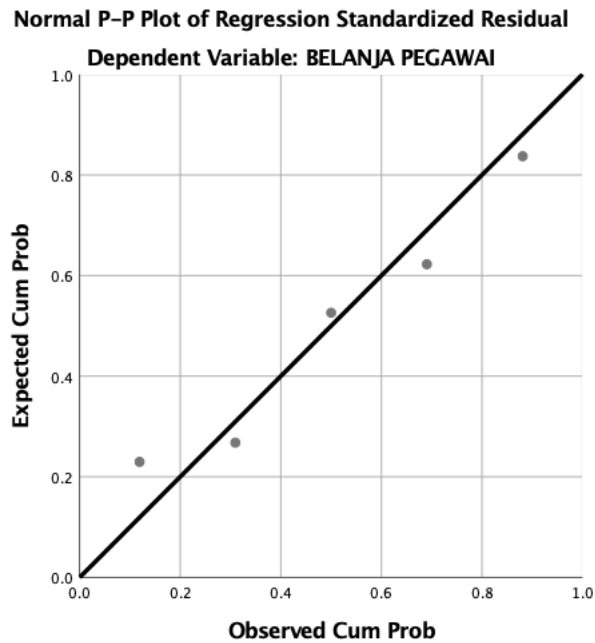
Selain pengujian *kolmogorov-smirnov*, peneliti juga melakukan pengujian normalitas melalui analisis grafik. Pengujian normalitas melalui analisis grafik adalah dengan cara menganalisis melalui grafik histogram dan grafik normal *probability plot*. Untuk lebih jelasnya, berikut ini ditampilkan hasil uji normalitas dengan menggunakan analisis grafik yaitu grafik histogram dan grafik normal *probability plot* sebagai berikut :





Sumber : data sekunder yang telah diolah menggunakan SPSS 25  
Gambar 4. 4

Grafik Histogram Uji Normalitas



Sumber : data sekunder yang telah diolah menggunakan SPSS 25  
Gambar 4. 5

Grafik Normal P-Plot Uji Normalitas

Dari kedua grafik di atas dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan peneliti berdistribusi normal. Pada Grafik Histogram menunjukkan bahwa data yang digunakan mengikuti kurva berbentuk seperti lonceng ke arah kiri atau kanan, sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal. Pada Grafik *normal p-plot* menunjukkan bahwa data yang dipakai peneliti tersebar di dekat garis diagonal yang ada pada grafik, hal tersebut menunjukkan bahwa data yang digunakan peneliti berdistribusi normal.

#### 4.3.2.2 Uji Multikolonieritas

Uji Multikolonieritas ini pada dasarnya bertujuan untuk menguji apakah didalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Multikolonieritas dapat dilihat dari perhitungan nilai tolerance serta Varian Inflation Factor (VIF). Suatu model regresi dikatakan tidak memiliki kecenderungan adanya gejala multikolonieritas adalah apabila memiliki nilai VIF yang lebih kecil dari 10 dan nilai Tolerance  $> 0,10$ . Hasil uji Multikolonieritas dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4. 9  
Hasil Uji Multikolonieritas

Model		Coefficients <sup>a</sup>		Standardized			Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Coefficients		Tolerance	VIF	
		B	Std. Error	Beta	t			Sig.
1	(Constant)	-1.322.578.875.258.420	2.277.822.776.825.370		-.581	.620		
	PAD	.451	.379	.585	1.191	.356	.999	1.001
	DANA							
	PERIMBANGAN	1.830	2.067	.435	.885	.469	.999	1.001

a. Dependent Variable: BELANJA PEGAWAI

Sumber : data sekunder yang telah diolah menggunakan SPSS 25

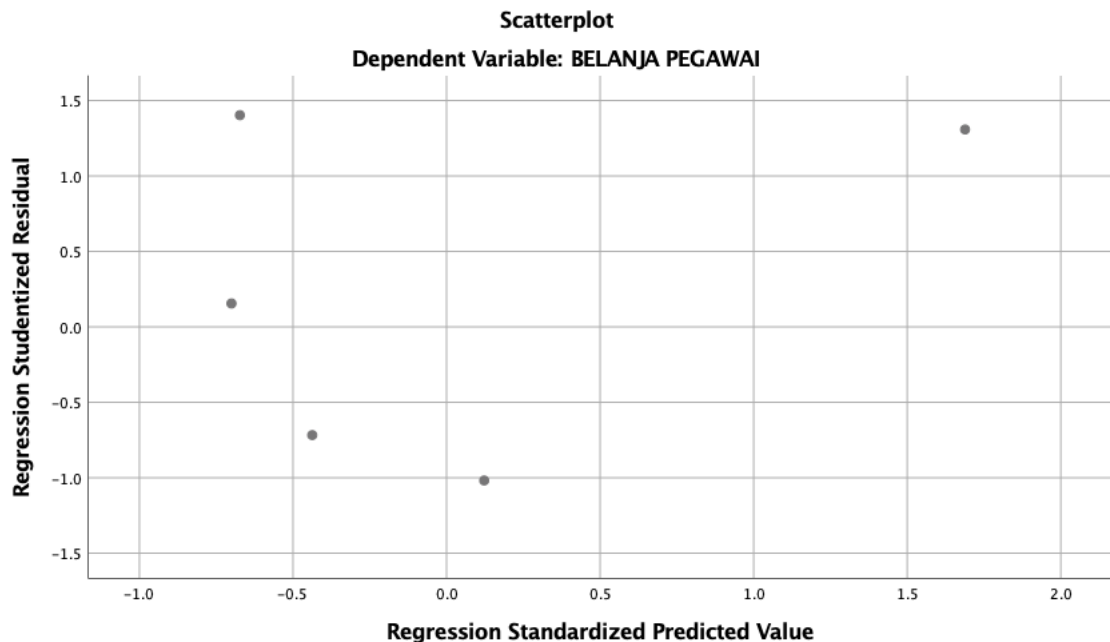
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa angka Tolerance dari masing-masing variabel independen memiliki angka  $> 0,10$ . Pendapatan asli daerah (X1) memiliki nilai tolerance 0,999 ( $0,999 > 0,10$ ), Dana Perimbangan (X2) memiliki nilai tolerance 0,999 ( $0,999 > 0,10$ ). Uji multikolonieritas juga dapat dilihat bahwa dari semua variabel independen memiliki angka VIF  $< 10$ . Pendapatan asli daerah (X1) memiliki nilai VIF 1,001 ( $1,001 < 10$ ), Dana Perimbangan (X2) memiliki nilai VIF 1,001 ( $1,001 < 10$ ). Berdasarkan data tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah multikolonieritas atau seharusnya tidak terjadi regresi diantara variabel independen.

#### 4.3.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Dalam penelitian ini, untuk mendeteksi ada tidaknya gejala heteroskedastisitas adalah dengan melihat plot grafik yang dihasilkan dari pengolahan data dengan menggunakan program SPSS versi 25 Dasar pengambilan keputusannya adalah:

1. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur, (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas, seperti titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari heteroskedastisitas. Berikut ini dilampirkan grafik scatterplot untuk menganalisis apakah terjadi heteroskedastisitas dengan mengamati penyebaran titik-titik pada gambar. Berikut ini adalah grafik scatterplot untuk menganalisis apakah terjadi heteroskedastisitas dengan mengamati penyebaran titik-titik pada gambar.



Sumber : data sekunder yang telah diolah menggunakan SPSS 25

Gambar 4. 6

Grafik Uji Heteroskedastisitas

Dari hasil tampilan output scatter plot, scatter plot menunjukkan titik data menyebar secara acak tidak membentuk sebuah pola tertentu atau tidak teratur, serta titik-titik menyebar secara jelas yaitu di atas, di bawah dan di sekitar angka nol pada

sumbu Y maka data penelitian bebas dari heterokedastisitas dan data layak digunakan untuk penelitian.

#### 4.3.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya Penyimpangan asumsi klasik autokorelasi atau korelasi yang terjadi antara Residual pada saat pengamatan lain pada model regresi. Penelitian ini Menggunakan alat uji autokorelasi yaitu uji Run-test. Uji Run-test adalah bagian dari statistik non-parametrik yang dapat Digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi Atau tidak. Berikut adalah hasil uji Run-test untuk data pada penelitian ini.

Tabel 4. 10  
Hasil Uji Autokorelasi

Runs Test	
Unstandardized Residual	
Test Value <sup>a</sup>	450.206.476.487.988
Cases < Test Value	2
Cases >= Test Value	3
Total Cases	5
Number of Runs	4
Z	.109
Asymp. Sig. (2-tailed)	.913
a. Median	

Sumber : data sekunder yang telah diolah menggunakan SPSS 25

Tabel 4.4 diatas menunjukkan bahwa nilai Asymp.Sig. (2-tailed) dengan Nilai 0,913 yakni lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, data yang Dipergunakan cukup random sehingga tidak terdapat masalah autokorelasi Pada data yang diuji.

#### 4.3.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Data yang telah lulus uji asumsi klasik dapat digunakan dalam model regresi dan dianalisis. Analisis yang dilakukan dengan mencari koefisien setiap variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan pada model regresi untuk melihat pengaruhnya terhadap variabel dependen yaitu Belanja Pegawai. Berikut hasil analisis regresi linier berganda yang dilakukan peneliti:

Tabel 4. 11  
Analisis Regresi Linier Berganda

Model		Coefficients <sup>a</sup>						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	-1.322.578.875.258.420	2.277.822.776.825.370		-.581	.620		
	PAD	.451	.379	.585	1.191	.356	.999	1.001
	DANA PERIMBANGAN	1.830	2.067	.435	.885	.469	.999	1.001

a. Dependent Variable: BELANJA PEGAWAI

Sumber : data sekunder yang telah diolah menggunakan SPSS 25

Dari analisis regresi yang dilakukan, diperoleh koefisien setiap variabel untuk membentuk suatu persamaan regresi. Persamaan regresi yang dibentuk adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Belanja Pegawai = -1.322.578.875.258.420 + 0.451 PAD + 1.830 Dana Perimbangan

Dimana:

Y = Belanja Pegawai

a = Konstanta

b<sub>1</sub> = Koefisien regresi untuk Pendapatan Asli Daerah

X<sub>1</sub> = Pendapatan Asli Daerah

b<sub>2</sub> = Koefisien regresi untuk Dana Perimbangan

X<sub>2</sub> = Dana Perimbangan

e = Error

Persamaan regresi yang telah diperoleh sebagai berikut :

1. a = -1.322.578.875.258.420

Nilai a sebesar -1.322.578.875.258.420 menunjukkan apabila setiap variabel independen (Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan) dianggap konstan, maka nilai Belanja Pegawai akan berubah sebesar -1.322.578.875.258.420.

2. b<sub>1</sub> = 0,451

Nilai b<sub>1</sub> sebesar 0,451 menunjukkan bahwa pengaruh yang diberikan variabel Pendapatan Asli Daerah terhadap variabel Belanja Pegawai adalah sebesar 0,451. Bila

variabel Pendapatan Asli Daerah naik sebesar 1 maka variabel Belanja Pegawai naik sebesar 0,451.

3.  $b_2 = 1.830$

Nilai  $b_2$  sebesar 1.830 menunjukkan bahwa pengaruh yang diberikan variabel Dana Perimbangan terhadap variabel belanja Pegawai adalah sebesar 1.830. Bila variabel Dana Perimbangan naik sebesar 1 maka variabel Belanja Pegawai naik sebesar 1.830.

#### 4.3.4 Analisis Uji Hipotesis

Dalam pengujian hipotesis akan dilakukan pengujian koefisien determinasi ( $R^2$ ), pengujian signifikansi parsial (uji-t), dan uji signifikansi simultan (uji F).

##### 4.3.4.1 Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji koefisien determinasi adalah penujian untuk melihat seberapa besar kemampuan semua variabel independen dalam menjelaskan variance dari variabel dependennya. Untuk model regresi dengan dua atau lebih variabel dependen, koefisien determinasi ditunjukkan oleh nilai adjusted R square ( $adj R^2$ ), seperti yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 4. 12  
Uji Koefisien Determinasi

Model Summary <sup>b</sup>						
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson	
1	.720a	.519	.037	68.940.586.151.414	2.469	
a. Predictors: (Constant), DANA PERIMBANGAN, PAD						
b. Dependent Variable: BELANJA PEGAWAI						

Sumber : data sekunder yang telah diolah menggunakan SPSS 25

Hasil pengujian koefisien determinasi menunjukkan bahwa nilai adjusted R square untuk model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar 0,037 yang mengindikasikan bahwa belanja pegawai mampu dijelaskan oleh variabel independen yaitu pendapatan asli daerah dan dana perimbangan sebesar 3,7%, sisanya yakni 96,3% dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian ini.

##### 4.3.4.2 Hasil Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah ( $X_1$ ) dan Dana Perimbangan ( $X_2$ ) terhadap variabel dependen yaitu Belanja Pegawai ( $Y$ ). Uji t dilakukan dengan membandingkan antara t hitung dengan t tabel dengan tingkat signifikansi 5%. Kriteria pengujian yang digunakan yaitu:

1. Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $n-k-1$ ) maka  $H_0$  ditolak
2. Jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$  ( $n-k-1$ ) maka  $H_0$  diterima

Nilai  $t$  tabel dengan  $df = n-k-1 = 5-2-1$  maka nilai  $t$  tabel diperoleh sebesar 2,91999. Selain itu uji  $t$  tersebut dapat pula dilihat dari besarnya propabilitas value ( $p$  value) dibandingkan dengan 0,05 atau taraf signifikansi  $\alpha = 5\%$ . Kriteria pengujian yang digunakan adalah jika  $p$  value  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan jika  $p$  value  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima. Dari hasil penelitian, didapatkan bahwa koefisien regresi nilai  $t$  dan signifikansi secara parsial adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 13  
Hasil Uji Parsial (uji  $t$ )

Model		Coefficients <sup>a</sup>						Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.	Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta					
1	(Constant)	-1.322.578.875.258.420	2.277.822.776.825.370			-.581	.620		
	PAD	.451	.379	.585		1.191	.356	.999	1.001
	DANA PERIMBANGAN	1.830	2.067	.435		.885	.469	.999	1.001

a. Dependent Variable: BELANJA PEGAWAI

*Sumber : data sekunder yang telah diolah menggunakan SPSS 25*

Berdasarkan hasil pengujian parsial (uji  $t$ ) dari tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Variabel Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai  $t$  hitung  $< t$  tabel dimana 1.191  $< 2,91999$  dengan tingkat signifikansi 0,356 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat dinyatakan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Belanja Pegawai pada kota Bogor 2016-2020.
2. Variabel Dana Perimbangan memiliki  $t$  hitung  $< t$  tabel dimana 0,885  $< 2,91999$  dengan tingkat signifikansi 0,469 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat dinyatakan bahwa dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap Belanja Pegawai pada kota Bogor 2016-2020.

#### 4.3.4.3 Uji Simultan (Uji F)

Uji F ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh secara bersama-sama (simultan) variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian ini dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan melihat signifikan atau dengan membandingkan  $F_{hitung}$  dengan  $F_{tabel}$ . Kriteria pengujian yang digunakan adalah:

1. Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  (n-k) maka  $H_0$  ditolak maka secara statistik data yang digunakan membuktikan bahwa semua variabel independen berpengaruh terhadap nilai variabel (Y).
2. Jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$  (n-k) maka  $H_0$  diterima maka secara statistik data yang digunakan membuktikan bahwa semua variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel (Y).

Untuk melihat variabel independen berpengaruh secara signifikan dapat dilihat dengan signifikansi setiap variabel independen dengan taraf signifikansi 5% atau 0,05.

1. Jika signifikansi  $> 0,05$  maka pengaruh variabel independen tidak signifikan
2. Jika signifikansi  $< 0,05$  maka pengaruh variabel independen signifikan

Tabel 4. 14  
Hasil Uji Simultan (Uji F)

Model		ANOVA <sup>a</sup>				
		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	10.238.899.433.099.000.000.000.000	2	5.119.449.716.549.520.000.000.000	1.077	.481b
	Residual	9.505.608.837.800.980.000.000.000	2	4.752.804.418.900.490.000.000.000		
	Total	19.744.508.270.900.000.000.000.000	4			

a. Dependent Variable: BELANJA PEGAWAI  
b. Predictors: (Constant), DANA PERIMBANGAN, PAD

Sumber : data sekunder yang telah diolah menggunakan SPSS 25

Berdasarkan hasil Uji F dapat diketahui bahwa secara simultan variabel Pendapatan Asli Daerah (X1), dan Dana Alokasi Umum (X2) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Belanja Pegawai (Y). Hal ini dapat dibuktikan dari nilai F hitung sebesar  $1.077 < F_{tabel}$  sebesar 9,55 dengan signifikansi  $= 0,481 < \alpha = 5\%$ , dengan signifikansi  $= 0,481 < \alpha = 5\%$ , maka  $H_3$  ditolak, artinya Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Perimbangan (X2) tidak berpengaruh positif dan Tidak signifikan secara simultan terhadap Belanja Pegawai pada kota Bogor 2016-2020.

#### 4.4 Pembahasan & Interpretasi Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan terhadap Belanja Pegawai ditemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah (X1) tidak berpengaruh terhadap Belanja Pegawai (Y), Dana



Perimbangan (X2) tidak berpengaruh terhadap Belanja Pegawai (Y). Berikut hasil pengujian hipotesis penelitian ini:

Tabel 4. 15  
Kesimpulan Hasil Pengujian Hipotesis

No	Hipotesis	Hasil	Kesimpulan
1	H1 : Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Pegawai Pada Kota Bogor Tahun 2016-2020	Pendapatan Asli Daerah tidak Berpengaruh terhadap Belanja Pegawai	Ditolak
2	H2 : Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Belanja Pegawai Pada Kota Bogor Tahun 2016-2020	Dana Perimbangan Tidak Berpengaruh terhadap Belanja Pegawai	Ditolak
3	H3 : Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Belanja Pegawai Pada Kota Bogor Tahun 2016-2020	Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Tidak Berpengaruh terhadap Belanja Pegawai	Ditolak

#### 4.4.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Pegawai

Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pegawai Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan, bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Pegawai. Hal ini terbukti melalui uji regresi berganda menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,451 artinya setiap kenaikan PAD sebesar satu satuan akan meningkatkan Belanja Pegawai. Hasil pengujian hipotesis  $t_{hitung} (1,191) < t_{tabel} (2,91999)$  dengan tingkat signifikansi sebesar 0,356 yang berada diatas 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah secara signifikan tidak mempengaruhi Belanja Pegawai pada kota bogor. Hasil tersebut membuktikan bahwa H1 ditolak, maka dapat disimpulkan Pendapatan Asli daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Pegawai, karena Pendapatan Asli Daerah di Kota Bogor masih kecil dan di dominasi oleh dana perimbangan.

Hal ini sama dengan beberapa penelitian terdahulu diantaranya adalah penelitian Pinem (2016) yang menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak menunjukkan hubungan yang signifikan dengan Alokasi belanja pegawai, atau dengan kata lain bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Pegawai.

#### **4.4.2 Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Pegawai**

Dana Perimbangan Terhadap Belanja Pegawai Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan, bahwa Dana Perimbangan tidak berpengaruh terhadap Belanja Pegawai. Hal ini terbukti melalui uji regresi berganda menunjukkan nilai koefisien sebesar 1,830 artinya setiap kenaikan Dana Perimbangan sebesar satu satuan akan meningkatkan Belanja Pegawai. Hasil pengujian hipotesis t hitung  $(0,885) < t \text{ tabel } (2,91999)$  dengan tingkat signifikansi sebesar 0,469 yang berada diatas 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa Dana Perimbangan secara signifikan tidak mempengaruhi Belanja Pegawai pada kota bogor 2016-2020. Hasil tersebut membuktikan bahwa H2 ditolak, maka dapat disimpulkan Dana Perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Pegawai, karena dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari Dana Transfer Pemerintah untuk daerah yang ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN tetapi oleh daerah belum di Kelola dengan baik sehingga besar kecilnya dana perimbangan tidak mempengaruhi belanja pegawai.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Penelitian Firman H. (2016) yang menunjukkan Bahwa Dana Perimbangan tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah. hasil penelitian dari Ariv Cahyono (2010), dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Dana Perimbangan tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Demikian juga hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Maria Reka Novianti (2013), dimana hasil penelitiannya tentang Dana Perimbangan tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal di Kota Bandung.

#### **4.4.3 Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan**

Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Pegawai Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan, bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan tidak berpengaruh terhadap Belanja Pegawai. Hal ini terbukti melalui Uji F dapat diketahui bahwa secara simultan variabel Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Pendapatan (X2) tidak mempengaruhi yang signifikan terhadap variabel Belanja Pegawai (Y). Hal ini dapat dibuktikan dari nilai F hitung sebesar  $1.077 < F \text{ tabel } \text{ sebesar } 9,55$  dengan signifikansi  $= 0,481 < \alpha = 5\%$ , dengan signifikansi  $= 0,481 < \alpha = 5\%$ , maka H1 diterima, artinya Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Perimbangan (X2) tidak berpengaruh positif dan Tidak signifikan secara simultan terhadap Belanja Pegawai pada kota Bogor 2016-2020.

Hasil tersebut membuktikan bahwa H3 ditolak, maka dapat disimpulkan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan merupakan bagian dari sumber-sumber pendapatan daerah yang mempengaruhi pemerintah daerah dalam belanja pegawai apabila kualitas pendapatan asli daerah dan dana perimbangan semakin di tingkatkan , maka tidak memungkiri bahwa belanja pegawai pun akan semakin kecil. Dengan kata lain, apabila pemerintah daerah dalam menggunakan dan memanfaatkan secara baik dan produktif sehingga pendapatan asli daerah dan dana perimbangan dapat stabil serta semakin meningkat . Maka Belanja Pegawai pun akan tidak semakin

meningkat pula. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Penelitian Simatupang (2016) yang menunjukkan Bahwa belanja pegawai tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan dalam Bab IV, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. Secara parsial, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Pegawai pada kota Bogor 2016-2020. Hal ini dibuktikan dalam pengujian statistik pada uji t (parsial) yang menunjukkan bahwa nilai t hitung  $< t$  tabel dimana  $1.191 < 2,91999$  dengan tingkat signifikansi  $0,356$  lebih besar dari  $0,05$ . Artinya, tingginya pendapatan asli daerah tidak mempengaruhi tingginya belanja pegawai di kota bogor tahun 2016-2020, mungkin meningkatnya pendapatan asli daerah mempengaruhi belanja daerah lainnya. Hal ini tidak sesuai dengan  $H_1$  yang menyatakan pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja pegawai
2. Secara Parsial, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Pegawai pada kota Bogor 2016-2020. Hal ini dibuktikan dalam pengujian statistik pada uji t (parsial) yang menunjukkan bahwa nilai t hitung  $< t$  tabel dimana  $0,885 < 2,91999$  dengan tingkat signifikansi  $0,469$  lebih besar dari  $0,05$ . Artinya, tingginya dana perimbangan bisa dimanfaatkan untuk belanja daerah lainnya, sehingga kenaikan pada belanja pegawai tidak ditekankan atau berpengaruh kepada dana perimbangan. Hal ini tidak sesuai dengan  $H_2$  yang menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja pegawai.
3. Secara simultan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Pegawai pada kota Bogor 2016-2020. Hal ini dibuktikan dalam pengujian statistik pada uji f (simultan) yang menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar  $1.077 < F$  tabel sebesar  $9,55$  dengan signifikansi  $= 0,481 < \alpha = 5\%$ . Artinya, tingginya pendapatan asli daerah dan dana perimbangan bisa dialokasikan kepada anggaran belanja daerah lainnya selain belanja pegawai, sehingga tinggi atau besarnya belanja pegawai tidak ditekan oleh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan. Hal ini tidak sesuai dengan  $H_3$  yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja pegawai.

## 5.2 Saran

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Pegawai. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, hasil Penelitian dan kesimpulan telah dijabarkan sebelumnya, maka adapun saran yang disampaikan peneliti dalam mengadakan penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Saran bagi Pemerintah Daerah
  - a. Diharapkan dapat lebih mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh daerah, sehingga nantinya dapat membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta mengurangi ketergantungan keuangan daerah kepada pemerintah pusat dan juga dapat memberikan pelayanan publik yang baik pada daerah itu sendiri.
  - b. Pemerintah daerah sebaiknya memaksimalkan tujuan sesungguhnya dalam penyusunan anggaran dengan benar-benar mengutamakan kebutuhan dan kepentingan masyarakat umum serta meningkatkan pengawasan atas pengelolaan anggaran dari awal proses penganggaran.
  - c. Pada saat penyusunan anggaran agar dilakukan dengan secara cermat sehingga pada saat realisasi anggaran dana dapat terserap seoptimal mungkin sehingga dimungkinkan belanja daerah tidak banyak dialokasikan kepada belanja pegawai saja tetapi belanja lain yang lebih membutuhkan juga terus ditambah.
2. Saran bagi peneliti selanjutnya
  - a. Memperbesar sampel penelitian dengan cara menambah periode penelitian dan wilayah penelitian, sehingga memperoleh hasil yang lebih Akurat. selain itu penelitian selanjutnya disarankan agar mengambil Data Kota di luar kota bogor. Ini Dimaksudkan agar dapat membandingkan apakah hasil penelitian ini Berlaku juga untuk Kota di luar kota Bogor.
  - b. Bagi peneliti selanjutnya untuk menambah variabel – variabel yang Mempengaruhi alokasi anggaran belanja pegawai.



## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Subekan. 2012. *Keuangan Daerah*. Malang.
- Adisasmita, Raharjo. 2014. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Asteria, B. (2015). Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah. *Jurnal Riset Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Program Magister Manajemen*, 2(1), 51–61.
- Budianto, B ., & Alexander, S. W. (2016). Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*, 4(4), 844–851.
- Erlina. 2011. *Metodologi Penelitian*. USU Press. Medan.
- Erlina, Rasdianto. 2015. *Akutansi Keuangan Daerah berbasis aktual*. Medan. Brama Ardian.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program (IBM SPSS) Edisi 8*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2012. *Akutansi Keuangan Daerah. Edisi ke Empat*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2014. *Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Empat*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hutabarat. 2013. *Pengaruh Rasio Likuiditas, Solvabilitas, Aktivitas, Profitabilitas, dan Rasio pasar terhadap Perubahan Laba*. *Jurnal MIX*.
- Karyadi, S.A. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintah. 2010. *Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan* Jakarta.
- Kusnandar dan Siswantoro. 2012. *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli daerah, Sisa lebih Pembiayaan Anggaran, dan luas Wilayah terhadap Belanja Modal*. Simposium Nasional Akuntansi XV. Banjarmasin.
- Mahmudi. 2016. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit UII Press Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pembiayaan Daerah.

Saragih, F. 2020. *Analisis Rasio Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tebing*. Seminar Of Social Sciences Engineering & Humaniora E-ISSN 2775-4049 SCENARIO 2020.

Sianipar. 2011. *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara*. Skripsi: Universitas Sumatera Utara.

Sudaryo, Yoyo. 2017. *Keuangan di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Andi.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.

Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan.

Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah.

Wahyuni, dan Adi. 2012. “Analisis Pertumbuhan dan Kontribusi Dana Bagi Hasil terhadap Pendapatan Daerah (Studi pada Kabupaten/ Kota se-Jawa Bali”. National Conference UKWMS Surabaya.

[www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syifa Amalina  
Alamat : Ds. Cibeuteung Udik, Blok Masjid, RT 02, RW 01,  
No.16, Ciseeng, Bogor, Jawa Barat, 16120  
Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 25 Februari 1999  
Agama : Islam  
Pendidikan  
• SD : SDN 01 Pagi  
• SMP : SMPN 96 Jakarta  
• SMS : SMAN 1 Ciseeng  
• Perguruan Tinggi : Universitas Pakuan

Bogor, Juni 2022  
Peneliti,

(Syifa Amalina)

## LAMPIRAN 1

Realisasi PAD, Dana Perimbangan dan Belanja Pegawai Kota Bogor Tahun 2016-2020

Tahun	PAD	Dana Perimbangan	Belanja Pegawai
2016	783.873.587.219	1.097.614.311.436	1.044.030.978.405
2017	978.197.741.947	1.072.486.473.770	1.030.115.640.840
2018	912.197.971.288	1.066.762.734.201	1.108.690.038.689
2019	1.015.884.216.919	1.106.494.405.814	1.181.889.361.829
2020	872.017.242.152	1.083.171.964.899	1.010.111.841.189

## LAMPIRAN 2

Data Perhitungan Rasio Efektivitas, Ketergantungan dan Aktivitas

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan PAD}}{\text{Target penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tahun	PAD	Target pad	Rasio Efektivitas
2016	783.873.587.219	681.623.897.863	115%
2017	978.197.741.947	728.666.344.804	134%
2018	912.197.971.288	875.230.630.511	104%
2019	1.015.884.216.919	944.394.650.807	108%
2020	872.017.242.152	1.083.412.298.220	80%
Rata-rata			108%

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Dana Perimbangan}}{\text{Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 4. 16

Rasio Ketergantungan pada Kota Bogor Tahun 2016-2020

Tahun	Dana Perimbangan	Total Pendapatan Daerah	Rasio Ketergantungan
2016	1.097.614.311.436	2.152.370.082.886	51%
2017	1.072.486.473.770	2.289.359.362.675	47%
2018	1.066.762.734.201	2.328.703.432.669	46%
2019	1.106.494.405.814	2.559.857.207.794	43%
2020	1.083.171.964.899	2.428.579.503.649	45%
Rata-rata			46%

$$\text{Rasio Aktivitas} = \frac{\text{Belanja Pegawai}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 4. 17

Rasio Aktivitas Belanja Pegawai

<b>Tahun</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>Total Belanja Daerah</b>	<b>Rasio Aktivitas</b>
2016	1.044.030.978.405	2.155.296.888.270	48%
2017	1.030.115.640.840	2.245.590.002.914	46%
2018	1.108.690.038.689	2.406.586.936.843	46%
2019	1.181.889.361.829	2.528.443.956.613	47%
2020	1.010.111.841.189	2.354.870.702.982	43%
Rata-rata			46%

### LAMPIRAN 3

Hasil Olah SPSS

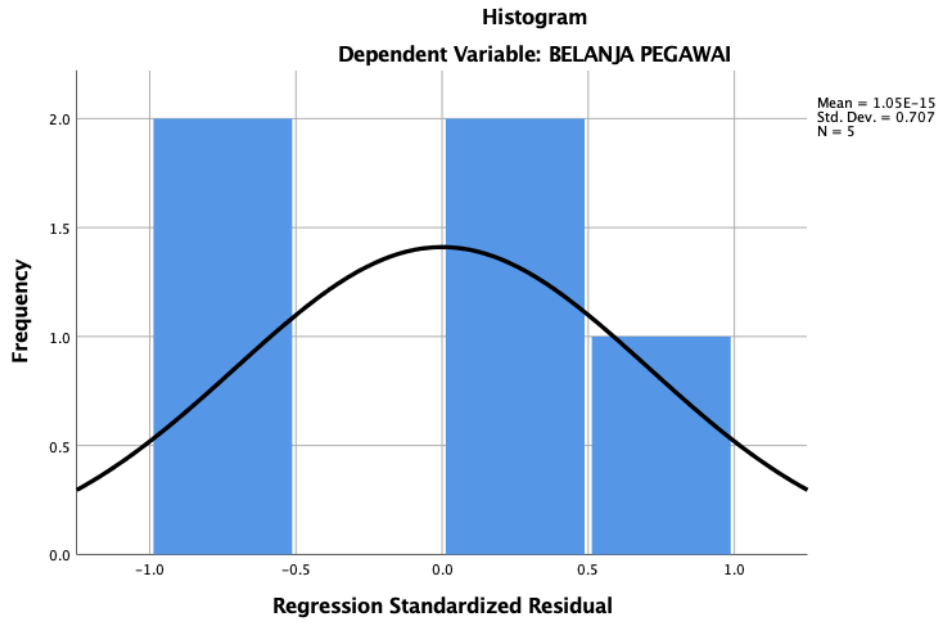
Deskriptif Statistik

	Descriptive Statistics				
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	5	783.873.587.219	1.015.884.216.919	912.434.151.905	91.088.098.693.329
DANA PERIMBANGAN	5	1.066.762.734.201	1.106.494.405.814	1.085.305.978.024	16.682.252.069.252
BELANJA PEGAWAI	5	1.010.111.841.189	1.181.889.361.829	1.074.967.572.190,40	70.257.576.585.910
Valid N (listwise)	5				

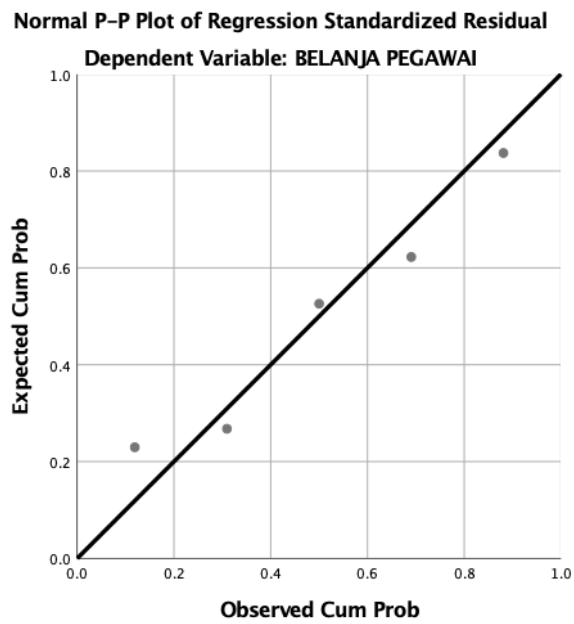
Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		5
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000732
	Std. Deviation	4.874.835.596.663.990.000
Most Extreme Differences	Absolute	.210
	Positive	.210
	Negative	-.148
Test Statistic		.210
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>
a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data. c. Lilliefors Significance Correction. d. This is a lower bound of the true significance.		

## Grafik Histogram



## Grafik Normal P-Plot

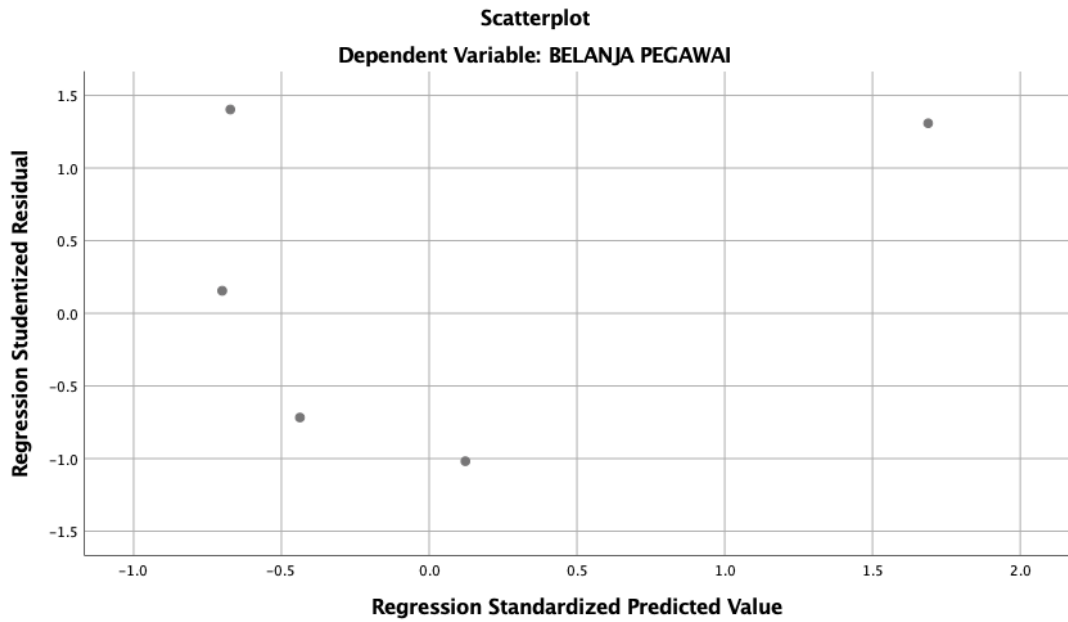


### Uji Multikolinearitas

Model	Coefficients <sup>a</sup>							
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF	
1	(Constant)	-1.322.578.875.258.420	2.277.822.776.825.370		-.581	.620		
	PAD	.451	.379	.585	1.191	.356	.999	1.001
	DANA							
	PERIMBANGAN	1.830	2.067	.435	.885	.469	.999	1.001

a. Dependent Variable: BELANJA PEGAWAI

### Uji Heteroskedastisitas



### Uji Autokorelasi Run Test

Runs Test Unstandardized Residual	
Test Value <sup>a</sup>	450.206.476.487.988
Cases < Test Value	2
Cases >= Test Value	3
Total Cases	5
Number of Runs	4
Z	.109
Asymp. Sig. (2-tailed)	.913
a. Median	

### Analisis Regresi Linear Berganda

Model		Coefficients <sup>a</sup>							
		Unstandardized Coefficients		Standardized			Collinearity		VIF
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance		
1	(Constant)	-1.322.578.875.258.420	2.277.822.776.825.370		-.581	.620			
	PAD	.451	.379	.585	1.191	.356	.999	1.001	
	DANA								
	PERIMBANGAN	1.830	2.067	.435	.885	.469	.999	1.001	
a. Dependent Variable: BELANJA PEGAWAI									

### Analisis Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Model Summary <sup>b</sup>						
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson	
1	.720a	.519	.037	68.940.586.151.414	2.469	
a. Predictors: (Constant), DANA PERIMBANGAN, PAD						
b. Dependent Variable: BELANJA PEGAWAI						



### Hasil Uji t

Model		Coefficients <sup>a</sup>		Standardized			Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Coefficients			Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.		
1	(Constant)	-1.322.578.875.258.420	2.277.822.776.825.370		-.581	.620		
	PAD	.451	.379	.585	1.191	.356	.999	1.001
	DANA							
	PERIMBANGAN	1.830	2.067	.435	.885	.469	.999	1.001

a. Dependent Variable: BELANJA PEGAWAI

### Hasil Uji F

Model		ANOVA <sup>a</sup>				
		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	10.238.899.433.099.000.000.000.000	2	5.119.449.716.549.520.000.000.000	1.077	.481b
	Residual	9.505.608.837.800.980.000.000.000	2	4.752.804.418.900.490.000.000.000		
	Total	19.744.508.270.900.000.000.000.000	4			

a. Dependent Variable: BELANJA PEGAWAI

b. Predictors: (Constant), DANA PERIMBANGAN, PAD